



KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SAMBUTAN MENTERI PANRB

November 2018

Desember 2018



 @KEMENPANRB

 @KEMPANRB

 @KEMPANRB

DISUSUN OLEH :
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PANRB

www.menpan.go.id



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

KATA PENGANTAR

Naskah sambutan, *keynote speech*, dan orasi ilmiah Menteri PANRB bukan sekedar lembaran-lembaran naskah yang bersifat administratif. Naskah-naskah tersebut merupakan wujud “kebijakan yang berbicara”, yang disampaikan secara langsung oleh Menteri PANRB selaku pimpinan organisasi.

Tidak hanya sebagai media penyampaian kebijakan, materi yang disampaikan oleh Menteri PANRB juga digunakan sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik dalam hal informasi capaian kinerja dan inovasi yang telah dilakukan Kementerian PANRB. Oleh karena itu, sebagai pejabat yang berwenang di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi, kehadiran Menteri PANRB dan materi yang disampaikannya menjadi hal yang ditunggu-tunggu dan menjadi perhatian banyak pihak.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Sekretariat Kementerian PANRB menyusun buku yang berjudul “**SAMBUTAN MENTERI PANRB NOVEMBER-DESEMBER 2018**”, yang merupakan kompilasi naskah sambutan, *keynote speech*, dan orasi ilmiah Menteri PANRB periode bulan NOVEMBER hingga DESEMBER 2018 ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan oleh Menteri PANRB dapat diketahui oleh masyarakat secara luas, tidak hanya para peserta yang menghadiri acara pada saat Menteri PANRB menyampaikan materinya.

Kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga buku ini dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak.

Jakarta, Januari 2019

Drs. Dwi Wahyu Atmaji, M.P.A.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Sambutan Menteri PANRB

NOVEMBER 2018

1. Sambutan pada Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim).....	1
2. Sambutan pada Acara <i>Gala Dinner</i> The International Public Service Forum 2018	4
3. Sambutan Selamat Datang pada Acara The International Public Service Forum 2018	6
4. Sambutan pada Penutupan The International Public Service Forum 2018	10
5. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian PANRB dengan Universitas Indonesia	12
6. <i>Keynote Speech</i> Seminar Nasional “Grand Design Public Administration Indonesia 2045”	18
7. Arah dan Strategi Kebijakan Pengembangan <i>Human Capital</i> Dalam Revolusi Industri 4.0.....	24
8. Peran Kepala Daerah dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara di Daerah.....	31
9. Peresmian ISYEF <i>Point</i> Dan Aplikasi ISYEF.....	38
10. Sambutan <i>Launching</i> Peresmian Aplikasi ETLE, IVRIS, dan Layanan SMS 8893	44
11. Sambutan Konferensi dan Musyawarah Nasional Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2018.....	47
12. Seminar Bakohumas Tematik Capaian 4 Tahun Reformasi Birokrasi	51
13. Sambutan Acara Evaluasi dan Apresiasi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2018.....	55



DESEMBER 2018

14. Sambutan pada Penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XL (Empat Puluh)	59
15. Laporan pada Acara Penghargaan Pembangunan Zona Integritas	63
16. Sambutan Acara Penyampaian Hasil Evaluasi, dan Pemberian Apresiasi Polres / TA / Tabes Tahun 2018.....	68
17. <i>Pointers</i> Sambutan Malam Apresiasi Anugerah ASN 2018.....	73
18. <i>Keynote Speech</i> Penguatan Kelembagaan dalam Pengembangan Kebijakan di Kementerian / Lembaga	75
19. <i>Keynote Speech</i> Rakernas Ombudsman RI (ORI)	80
20. Pengarahan Kepada Jajaran Kepala Daerah Se-Sulawesi Selatan	86
21. Sambutan Peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Padang	96



NOVEMBER
2018



**SAMBUTAN PADA PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN
GEDUNG POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP)
DAN POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM)
TANGERANG, 1 NOVEMBER 2018**



Yang saya hormati:

- Menteri Hukum dan HAM;
- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Gubernur Banten;
- Wali Kota Tangerang;
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM; serta
- Hadirin yang Berbahagia.

Assalaamua'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk Kita Semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersilaturahmi pada kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Poltekip dan Poltekim Kementerian Hukum dan HAM.



Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui, bahwa arah pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan pemerintahan berkelas dunia. Artinya, kita ingin meningkatkan kualitas dan kapasitas pemerintahan supaya memiliki daya saing yang tinggi dan menjadi negara maju yang disegani oleh bangsa lain.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia, harus didukung dengan sdm yang memiliki kompetensi tinggi dengan penguasaan terhadap bidang tugas yang mendalam, kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, selalu belajar, berkreasi, berinovasi dan mencari terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pekerja keras, membangun jejaring kerja lintas instansi untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Hadirin yang saya hormati,

Untuk mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia, kita memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai unsur terpenting dalam birokrasi. SDM yang dibutuhkan birokrasi adalah calon-calon ASN yang juga dihasilkan dari sistem pendidikan yang baik. Karena itu, lulusan perguruan tinggi dituntut untuk memenuhi kebutuhan ASN sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan untuk memasuki birokrasi.

Khusus untuk pendidikan vokasional, perguruan tinggi kedinasan juga harus mampu menghasilkan lulusan yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan kualitas yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Jika melihat kebutuhan pemerintah pada masa mendatang, dimana teknologi informasi sangat berperan dan serba cepat, saya berpendapat bahwa lulusan Politeknik Ilmu Pemasaran dan Politeknik Imigrasi harus dapat adaptif terhadap perkembangan zaman dan keuletan dengan di dukung oleh kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

Sudah jelas bahwa peran politeknik adalah menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Untuk menghasilkan lulusan yang berkelas dunia, saya menyarankan beberapa hal yang harus dilakukan oleh Poltekip dan Poltekim, yaitu antara lain:

1. Melakukan upaya-upaya transformasi agar Poltekip dan Poltekim mampu menjadi lembaga pendidikan yang berkelas dunia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa untuk menghasilkan lulusan yang berkelas dunia, maka perguruan tinggi juga harus masuk ke dalam jajaran lembaga pendidikan yang berkelas dunia;
2. Poltekip dan Poltekim juga harus secara terus-menerus memperbaharui kurikulumnya agar sesuai dengan kebutuhan bidang tugas;
3. Menyediakan berbagai sarana dan prasarana bagi para mahasiswa dan dosen-dosennya, mulai dari prasarana fisik sampai dengan kemudahan bagi setiap mahasiswa untuk melakukan penelitian yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat;



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

4. Membiasakan mahasiswa bekerja dengan rekan-rekan lain di luar profesinya sehingga memiliki kepekaan akan kebutuhan *stakeholder* dan juga menjadi perekat NKRI;
5. Membuat standar-standar kelulusan yang ketat, sehingga dapat menjamin bahwa lulusannya memiliki kualitas yang baik;
6. Membuka seluas mungkin peluang bagi mahasiswa untuk berkreasi dan berinovasi.

Hadirin yang saya hormati,

Saya sangat berharap bahwa Poltekip dan Poltekim benar-benar menghasilkan lulusan yang kompeten, sehingga mampu memberikan daya dorong bagi upaya kita menciptakan birokrasi yang berkelas dunia.

Perjuangan kita untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia, mau tidak mau harus dimulai dari langkah-langkah kecil, salah satunya adalah melalui pendidikan tinggi kedinasan. Jika semua melakukan hal yang sama dan bersama-sama, maka bukan tidak mungkin setiap langkah kecil kita menjadi langkah besar. Karena itu, janganlah berhenti, mari kita terus ikut berkontribusi memajukan bangsa dan negara ini.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang menjadi harapan kita semua dapat terwujud. Terima kasih.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



**SAMBUTAN PADA ACARA GALA DINNER
THE INTERNATIONAL PUBLIC SERVICE FORUM 2018
JAKARTA, 7 NOVEMBER 2018**

***Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamualaikum Wr. Wb.***

Allow me to start this special occasion by thanking to the honourable guests and participants for coming here tonight, on behalf of both my self and Ministry of Administrative and Bureucratic Reform of Republic of Indonesia, we all apreciate your presence here to be a part of this remarkable moment - The International Public Service Forum, which is providing, combining and realizing our big ideas to make better life in the future by implementing best practices of public services, that is based on the understanding needs and priorities of the people.



Yang saya hormati:

- Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI;
- Para Pimpinan Paguyuban Bidang PANRB;
- Para Duta Besar Negara Sahabat dan Mitra Pembangunan;
- Para Pimpinan Perguruan Tinggi;
- Para Pembicara;
- Tim Panel Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
- Para Inovator dan Exhibitor;
- Para Pimpinan Media Massa; serta
- Hadirin Undangan yang Berbahagia.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Puji syukur pada kesempatan yang berbahagia ini, sekaligus tulus saya ucapkan selamat kepada para inovator pelayanan publik K/L dan pemerintah daerah atas penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik atas usaha kuat untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui berbagai pembaruan di bidangnya.

Saya yakin, itulah wujud komitmen, inspirasi, dan motivasi bagi pihak lainnya, dan dengan harapan yang besar, marilah menjadikan *event* ini sebagai akselerator dan inkubator bagi peningkatan kepedulian dan partisipasi seluruh elemen bangsa, untuk secara progresif mendorong penguatan upaya, kerjasama dan kolaborasi seluruh pihak bagi terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik, yang semakin luas dan berkeadilan untuk rakyat, serta yang semakin mendorong kehadiran negara untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada seluruh elemen yang hadir dan berkomitmen melalui acara ini, untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara dan masyarakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Thank You.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**SAMBUTAN SELAMAT DATANG PADA ACARA
THE INTERNATIONAL PUBLIC SERVICE FORUM 2018
JAKARTA, 7 NOVEMBER 2018**



Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera.

Om Swastiastu.

Namo Budhaya.

Good Morning Ladies and Gentlemen.

Yang saya hormati:

- Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jusuf Kalla;
- Para Menteri dan Kepala Lembaga atau yang Mewakili;
- Para Duta Besar Negara Sahabat, *Greetings for the Ambassadors of Indonesia Colleague*;
- Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau yang Mewakili;
- Para Direksi BUMN;
- Para Mitra Pembangunan;
- Insan Pers dan Media Massa; serta
- Hadirin Tamu Undangan yang Berbahagia.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat menghadiri penyelenggaraan *The International Public Service (IPS) Forum tahun 2018*.

Kami haturkan terima kasih kepada Wakil Presiden RI, Bapak H. Muhammad Jusuf Kalla, serta para menteri, kepala lembaga negara, gubernur, bupati / wali kota, dan semua elemen yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir. Merupakan suatu kebanggaan, karena disini, melalui acara ini, telah ditunjukkan komitmen utuh seluruh komponen bangsa, dalam mewujudkan pemerintahan yang makin terbuka serta percepatan perbaikan pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan inovatif di Indonesia.

Telah hadir sebanyak 2.000 peserta dari Sabang sampai Merauke, lebih dari 56 praktisi dan 35 inovator yang berasal dari lebih 10 negara, yang dapat saling berinteraksi, berdiskusi, dan *sharing* pengalaman tentang sistem pelayanan terbaik dari pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat dan organisasi non *profit* - tiga kunci utama yang harus berkolaborasi agar pelayanan publik dapat fokus dan berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup, inti dari kesejahteraan rakyat.

Bapak Wakil Presiden RI serta hadirin yang berbahagia,

Pada Open Government Partnership Meeting di Korea Selatan, saya memetik pokok penting yang mengalir deras pada *mindset* global. Bahwa, di era demokrasi, pemerintahan di seluruh dunia sudah menjadi semakin transparan, masyarakat sangat dahaga dengan kualitas pelayanan oleh negara, masyarakat juga semakin peduli dan melihat bagaimana berjalannya pemerintahan, hasrat terdalam di benak rakyat sesungguhnya adalah pemerintah bekerja dari rakyat - oleh rakyat - untuk rakyat, hadir dan melayani mereka.

Maka, sejalan itu, kami laporkan, Kemen PANRB yang menjadi *leading sector* reformasi birokrasi - sebagai nahkoda yang mengarahkan “perahu” ditengah arus transformasi postur pemerintahan, berupaya makin progresif untuk mendorong pemerintahan Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan jaman.

Capaian indeks reformasi birokrasi meningkat sepanjang tahun 2015 hingga 2017, (tercatat pada K/L → dari 65,78 menjadi 71,9), pada Pemda → dari 41,61 menjadi 60,47, pada Pemkot/kab → dari 42,96 menjadi 64,61), sehingga mendorong berbagai indeks global tentang daya saing, efektivitas, dan kemudahan berusaha di Indonesia. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, serta unit wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani juga mendorong pembangunan integritas dan efisiensi pemerintahan (sebanyak Rp. 41,15 triliun dihemat tahun 2017). Penataan 23 lembaga non-struktural sepanjang 2014 s.d. 2017, serta lembaga strategis lainnya makin mendorong peningkatan kinerja organisasi (yang kini tidak lagi tumpang tindih). Kualitas SDM aparatur negara juga ditingkatkan melalui rekrutmen dan re-orientasi kinerja pelayanan publik yang berkualitas.

Sejak tahun 2015, inovasi pelayanan publik semakin bertumbuh melalui iklim kompetisi yang sehat, didorong oleh kebijakan program “*one agency - one innovation*”. 9 (sembilan) mal pelayanan publik dengan konsep pelayanan terpadu dibentuk, dan pada tahun 2018 muncul lebih dari 2.824 inovasi, menunjukkan komitmen dan respon



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

kuat dari pemerintah pusat hingga daerah untuk menghadirkan program nyata bagi “Indonesia yang melayani rakyat”.

Bahkan, dunia internasional mengapresiasi *best practice* pelayanan publik di Indonesia, yang puncaknya diraih pada tahun 2018, menjadi juara 1 UNPSA - melalui inovasi “sistem edat untuk pengendalian malaria” dari Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Keseluruhan ini, ditujukan untuk membangun *platform* pelayanan yang mengutamakan inovasi, transparansi, akuntabilitas, integritas, kolaborasi, dan ketercukupan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta.

Bapak Wakil Presiden RI serta para hadirin,

Inilah, landasan bagi gerakan Indonesia melayani, jika “raganya” adalah keterlibatan seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah - rakyat dan privat perlu dilibatkan aktif, maka “rohnya” adalah revolusi mental, yang membuat masyarakat semakin peduli dan ikut terlibat langsung dalam menginisiasi serta berpartisipasi mewujudkan pelayanan publik yang makin berkualitas (saya melihat jelas, karakter bangsa untuk ini, sudah dibangun sejak dini, seperti saat pekan kerja nyata revolusi mental di Manado).

Atas gagasan itu, pada *The International Public Service Forum tahun 2018*, kami mendorong tema “*expanding and improving service delivery through collaboration action*” sebagai inspirasi dan pembelajaran bersama bahwa membangun negara, membutuhkan sinergi harmonis antara masyarakat, swasta, dan pemerintah - partisipasi publik menjadi “senyawa utama” bagi kualitas pelayanan publik.

Tentu, selain itu, modernisasi layanan, peningkatan profesionalisme SDM yang mengutamakan *hospitality*, akselerasi perbaikan pelayanan di daerah tertinggal dan perbatasan luar, mewujudkan kota ramah untuk masyarakat berkebutuhan khusus, juga menjadi topik pembahasan yang menarik untuk diulas dan dilakukan *benchmarking*.

Namun yang utama, besar harapan kami, momen ini menjadi wahana interaktif terkait reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik, dapat meningkatkan kerja sama antar-negara dalam percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM di bidang pelayanan publik, serta menguatkan kepedulian dan partisipasi publik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di berbagai sektor.

Sebagai inkubator, kami memberikan *award* untuk Top 40 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018 sebagai *role model* bagi pihak lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Satu catatan penting kami, bahwa inovasi tidak terlepas dari teknologi, dan teknologi menciptakan inovasi yang sifatnya silo-silo (terpisah) untuk berbagai varian karakter demografi di Indonesia. Oleh karenanya, Kemen PANRB sedang meningkatkan kapasitas *e-government system*, untuk membangun payung besar yang mengintegrasikan seluruhnya menjadi satu.

Ini membutuhkan kerja keras dan kerjasama yang kuat bersama masyarakat, saya berharap energi kita semua, motivasi kita semua, hasrat kita semua, ditujukan hanya untuk membangun kesejahteraan rakyat. Kita tidak boleh menunggu orang lain untuk membangun program yang luar biasa atau menunggu orang lain yang membuat inovasi besar. Janganlah kita kehilangan spirit melayani dari diri kita, dan luaskanlah spirit itu dari tempat kerja dimana kita berdiri pertama kali.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Selanjutnya, berkenan kiranya kami memohon doa restu, dukungan, dan perkenan Bapak Wakil Presiden RI untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara IPS forum 2018 secara simbolis, sehingga acara ini dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang semakin terbuka, tumbuh sejalan harapan rakyat, dan tentu makin dipercaya masyarakat.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



**SAMBUTAN PADA PENUTUPAN
THE INTERNATIONAL PUBLIC SERVICE FORUM 2018
JAKARTA, 8 NOVEMBER 2018**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji syukur atas ridho Allah SWT, kita semua dapat mengikuti acara *The International Public Service Forum 2018*, sejak awal dibukanya kemarin, hingga penutupan hari ini, dan saya mengikuti perkembangannya, sangat menggembirakan.

Terima kasih untuk seluruh menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, wali kota, direktur BUMN/BUMD, mitra pembangunan, ketua organisasi nirlaba, dan elemen masyarakat, yang sangat antusias bergabung - *sharing knowledge*, berdiskusi, dan menyimak seksama berbagai topik pembahasan menarik yang dapat dijadikan bekal dan acuan untuk semakin memperbaiki pelayanan publik pada masing - masing instansi (baik pemerintah, swasta maupun sektor privat).

To all participating speakers from many countries and agencies, I would like to present my highest appreciation and gratitude for your willingness to share the best valuable knowledge and experiences of public service on this event.

IPS Forum adalah etalase dan miniatur bagi segala rupa manifestasi pelayanan yang dapat direplikasi dan perlu diketahui masyarakat. 40 inovasi terbaik, 10 pengelolaan pengaduan terbaik, dan 5 *stand* pameran terbaik di bidang pelayanan publik, adalah hasil kerja keras bersama. Namun, tentu kita tidak boleh cepat berpuas diri, perjuangan untuk perbaikan harus tetap dilanjutkan, dan kolaborasi aparatur negara dan masyarakatnya sangatlah penting untuk menciptakan birokrasi yang enterpreneur, birokrat yang cepat dan adaptif terhadap perkembangan jaman, serta terus - menerus berinovasi untuk melayani, tanpa menggerus kearifan lokal, budaya dan integritas bangsa, serta kepercayaan masyarakat sebagai pengguna utama layanan itu.





MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Lebih dari pada itu, besar harapan kami, atas nama pemerintah Indonesia, bahwa ribuan produk pelayanan publik, telah dihadirkan negara untuk masyarakat sebagai persembahan untuk terciptanya kemakmuran. Anda semua yang hadir disini adalah agen penting bagi perluasan informasi, praktik, implementasi dan *market* untuk berbagai produk pelayanan itu, bukan hanya kepada seluruh masyarakat di penjuru tanah air, tetapi juga untuk masyarakat dunia di banyak negara yang benar - benar membutuhkan pelayanan itu.

Pelayanan publik adalah siklus yang dinamis, selalu berubah mengikuti tumbuhnya peradaban dan tren kebutuhan masyarakat, dan tidak akan lekang oleh batas - batas negara. Maka, jangan takut untuk mencontoh hal yang baik - jika itu adalah yang terbaik untuk masyarakat, tetapi jangan pula berhenti untuk berinovasi - karena inovasi adalah kunci mendorong keterbukaan tentang pengetahuan baru, mengubah platform kultur dan *mindset* ego sektoral instansi menuju *dynamic government*.

Mari berkaca sejauh mana pelayanan publik kita dapat bersaing bahkan disejajarkan dengan praktik pelayanan terbaik di berbagai belahan dunia → dengan demikian kita tahu segala kekurangan dan cara untuk mendekati kesempurnaan. Sudah saatnya, Indonesia bangkit untuk melayani, dan kini waktunya generasi yang berpacu untuk negeri.

Saya ucapkan terima kasih kepada panitia (Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PANRB dan jajaran) serta seluruh pihak yang mendukung suksesnya acara, atas nama institusi saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan.

Let's follow our patriot's spirit - we don't need to fight for our independence, we just have to continue their fight by building our nation, by serve the people as best as you can. Wishing you would have a nice experience in going back to your country - with all best practices of expanding and improving public service delivery trough collaboratif action.

May god bless us all, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada kita untuk terus mengabdikan dan melayani masyarakat.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PANRB DENGAN UNIVERSITAS INDONESIA

JAKARTA, 09 NOVEMBER 2018

Yang saya hormati:

- Pimpinan Majelis Wali Amanah (MWA);
- Pimpinan Dewan Guru Besar (DGB);
- Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemen PANRB;
- Ketua dan Sekretaris Senat Akademik (SA);
- Para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Manajer Fakultas, Direktur & Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi; serta
- Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Indonesia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua



Puji syukur kehadiran **Allah SWT**, atas ridho-Nya saya sebagai aparatur negara dapat berdiskusi tentang berbagai program dan capaian penting **Reformasi Birokrasi Indonesia** dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan negara. Bahwa, sejak program Nawa Cita digulirkan pemerintah, melalui **3 (tiga) program wajib** dan **4 (empat) program prioritas**, Kementerian PANRB memiliki tugas yang sangat vital dalam menjalankan program dukungan yaitu **“reformasi birokrasi”** sebagai *“suatu kondisi perlu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan”*.

Oleh karenanya, **8 (delapan) area reformasi birokrasi** yang menjadi inti dari kerangka **revolusi mental** (pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan dan manajemen perubahan) adalah “bahtera” yang memandu dan mengarahkan transformasi di seluruh aspek tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang semakin bersih, akuntabel,



berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

4 (empat) kegiatan utama yang perlu diakselerasi Kementerian PANRB untuk merealisasikan hal tersebut, adalah: **1)** penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas aparatur; **2)** penataan kelembagaan dan tata laksana, **3)** peningkatan kualitas SDM aparatur, serta **4)** peningkatan kualitas pelayanan publik.

Para hadirin sekalian,

Pertama, penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi sejak tahun 2015 hingga akhir semester I tahun 2018, dicapai melalui **peningkatan indeks persepsi pelayanan publik** dan **indeks persepsi anti korupsi**. Kedua indeks tersebut, merepresentasikan tingkat perkembangan instansi pemerintahan dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik, yang **terus mengalami peningkatan**, baik di setiap K/L maupun pemerintahan provinsi, kota, dan kabupaten.

Nilai rata-rata **indeks reformasi birokrasi trennya meningkat** → pada **K/L meningkat dari 65,78** (tahun 2015) menjadi **71,91** (tahun 2017); pada **pemerintah provinsi meningkat dari 41,61** (tahun 2015) menjadi **60,47** (tahun 2017); pada **kabupaten/kota meningkat dari 42,96** (tahun 2015) menjadi **64,61** (tahun 2017).

Capaian tersebut telah mendongkrak berbagai indeks kebangsaan Indonesia di mata dunia, yaitu:

- 1) *world economic forum* mencatat **indeks daya saing nasional naik 5 peringkat** dari rangking 41 (2016) ke **rangking 36** (2017);
- 2) *world bank* mencatat **indeks kemudahan berusaha naik 19 peringkat** dari rangking 91 (2016) ke **rangking 72** (2017);
- 3) *transparency international* mencatat **indeks persepsi korupsi tetap stabil pada skor 37**; serta
- 4) *world bank* mencatat **indeks efektivitas pemerintah tahun 2016 naik 17 peringkat** dibandingkan tahun 2015.

Selanjutnya, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah menggeser grafik **kategori peringkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah** yang pada **tahun 2015** kecenderungannya: **A → 7, BB → 35, B → 75, CC → 201, C → 242, D → 15**, pada **tahun 2017** kecenderungannya: **A → 16, BB → 62, B → 198, CC → 196, C → 138, D → 3**. Artinya, banyak instansi pemerintah mengalami perbaikan, karena semakin **efisien** dan akuntabel dalam penggunaan anggaran, serta mampu menetapkan ukuran dan target kinerja kejelasan target kinerja.

Dampak **efisiensi** sangat signifikan. SAKIP mendorong upaya *re-focusing* program, perumusan sasaran kerja, *cross-cutting* program yang tidak bermanfaat, serta penguatan sinergi lintas kelembagaan, sehingga mewujudkan **penghematan anggaran pemerintah sebanyak 41,15 triliun rupiah**.

Selain itu, tahun 2017 telah dibangun **109 unit percontohan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** dan **18 unit percontohan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

(WBBM), lalu hingga akhir semester I tahun 2018, sudah diusulkan sebanyak **910 satuan kerja pelayanan** untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Secara khusus, fokus pembangunan **zona integritas tahun 2018 adalah pada sektor penegakan hukum** (Polres, Kejari dan Mahkamah Agung) untuk mengintegrasikan sistem percepatan penanganan perkara, serta **unit pelayanan BPN/ATR (kantor pertanahan) dan kecamatan**.

Para hadirin sekalian,

Kedua, penataan kelembagaan dan tata laksana, sejak 2014 s.d. 2017, **telah dihapus 23 lembaga non struktural** yang tugasnya tumpang tindih dan sudah ditangani K/L teknis.

Selanjutnya, Kementerian PANRB sudah melakukan **penataan terhadap 24 K/L** untuk **mendorong peningkatan kinerja organisasi**, yang meliputi: **di bidang Polhukum**, telah dilakukan penataan terhadap tata kelembagaan pada Kemenkumham; Badan Pembina Ideologi Pancasila; Polri; Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; Bawaslu; Komisi Pemilihan Umum. **Di bidang perekonomian dan kemaritiman**, telah dilakukan penataan terhadap tata kelembagaan pada Kementerian Keuangan; Kementerian Perhubungan; Kementerian ESDM; Kementerian PU; BP Batam; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pertanian; Badan Siber dan Sandi Negara; Kementerian Pariwisata; Badan Standarisasi Nasional; serta Sekretariat Jenderal DPR RI.

Di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, telah dilakukan penataan terhadap tata kelembagaan pada Kementerian Ristekdikti; Kementerian Agama; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Badan POM; Badan Otoritas Borobudur; dan Lembaga Administrasi Negara.

Melalui **Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Kementerian PANRB mendorong upaya percepatan integrasi infrastruktur, aplikasi, proses bisnis, serta *single and safety data* SPBE secara nasional, guna **meminimalisir duplikasi yang berakibat pemborosan keuangan negara**, melalui pelibatan beberapa K/L terkait (yaitu: Kemendagri, Kemenkominfo, Kemenkeu, Bappenas, BSSN, dan BPPT).

Para hadirin sekalian,

Ketiga, peningkatan kualitas SDM aparatur, dilakukan melalui rekrutmen ASN secara lebih transparan, berintegritas dan menyaring CPNS yang berkualitas, sebagai mesin utama bagi berjalannya roda pemerintahan.

Tahun 2017, dari 2.433.656 pelamar, sebanyak **33.155 orang** lolos seleksi CPNS dan **sudah bertugas** sesuai dengan jabatan yang ditentukan. Selain itu, juga direkrut **6.296 guru garis depan** pada Kemendikbud, **6.058 tenaga harian lepas** pada Kementerian Pertanian, dan **39.000 pegawai tidak tetap (dokter, dokter gigi, bidan)** pada Kementerian Kesehatan.



Tahun 2018, jumlah pelamar mencapai **3.628.284 orang**. Per tanggal 25 Oktober 2018 (hari ini) sudah berjalan tahap seleksi administrasi, selanjutnya dilakukan **tes CAT pada 873 titik** di seluruh Indonesia, dengan prinsip memudahkan dan mendekatkan pelamar ke lokasi tes. Diakhir proses seleksi, akan diambil sebanyak **238.015 formasi CPNS untuk ditempatkan** sebagai **tenaga pendidikan (52%)**, **tenaga kesehatan (25%)**, dan **tenaga teknis / infrastruktur (23%)**.

Pemerintah juga memanfaatkan **CPNS lulusan sekolah tinggi kedinasan sebagai agen pemersatu dan perekat NKRI**, melalui sistem penempatan yang menyebar ke seluruh daerah dan K/L, tidak ditempatkan di daerah asal.

Terobosan penting lainnya yang disegerakan oleh Kementerian PANRB adalah **rancangan PP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)**, untuk mengisi kekurangan pegawai dengan tenaga - tenaga yang kompeten. Ini juga dapat mengakomodasi para tenaga yang sudah mengabdikan lama untuk negara, namun tidak lolos dalam seleksi CPNS, atau menarik para diaspora yang berada di luar negeri untuk berperan membangun negeri. **Rancangannya sudah melalui rapat kabinet, sedang menunggu paraf dari menteri - menteri terkait, untuk kemudian ditetapkan oleh Presiden RI.**

Para hadirin sekalian,

Keempat, salah satu terobosan penting Kementerian PANRB terkait **peningkatan kualitas pelayanan publik** adalah pembentukan mal pelayanan publik. Hingga tahun 2018, **sudah beroperasi 10 mal pelayanan publik**, yang memadukan beragam pelayanan dari pemda, pemerintah pusat, BUMN/BUMD pada satu lokasi yang mudah diakses masyarakat. Saat ini, **15 mal pelayanan publik**, di 15 daerah lainnya, sudah siap diluncurkan dan segera diresmikan.

Inovasi pelayanan publik juga dikembangkan secara luas melalui ajang kompetisi inovasi pelayanan publik yang setiap tahunnya diikuti oleh K/L, pemda, BUMN/BUMD. Bagi instansi daerah yang masuk kategori **top 40 inovasi**, diberikan **dana insentif daerah**.

Tahun 2018, inovasi pelayanan publik dari Kabupaten Teluk Bintuni: **“Pengendalian Malaria Melalui Sistem Edat”** yang mewakili Indonesia, meraih **juara pertama kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat internasional yang diselenggarakan PBB**.

Kementerian PANRB juga membangun **Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)** yang terintegrasi dengan - **Lapor!**. Sistem ini berkolaborasi bersama dengan **Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman RI**, guna mengintegrasikan pengelolaan pengaduan masyarakat agar direspon cepat oleh instansi terkait. Sebanyak **834 instansi** terhubung melalui sistem ini, aktivitas pengaduan hingga akhir September 2018 sebanyak **1.335.389** (estimasi laporan masyarakat perharinya sebanyak **574 laporan**).

Terakhir, sebagai suplemen, **Kementerian PANRB juga mendorong kerja sama ke luar (dengan berbagai negara)**, seperti: **1) Korea Selatan** untuk pengelolaan



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SDM ASN dan *e-Government*; **2) Australia** untuk pengelolaan SDM ASN; **3) Azerbaijan dan Georgia** untuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Sedangkan, **kerja sama ke dalam** dilakukan dengan berbagai K/L lain (seperti: Kementerian BUMN, Kemendikbud, Kemenristekdikti, BPPT, BSSN, dan lainnya) masih berlanjut untuk mengadopsi kebijakan yang tepat bagi perluasan budaya kerja yang mencerminkan ***world class government***.

Para hadirin sekalian,

Pada tanggal 5 November 2018, **Open Government Partnership (OGP) regional asia pasifik** memberikan inspirasi besar bagi pemerintah Indonesia untuk berkomitmen mendorong **pemerintahan yang semakin transparan, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seluruh pimpinan delegasi, yang notabenenya adalah top decision maker di negaranya**, saling berbagi pengalaman dan mengeksplorasi **strategi menuju pemerintahan terbuka**, untuk memperbarui kepercayaan publik melalui inovasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada simbiosis mutualisme antara pemerintah dan masyarakatnya sendiri, termasuk sektor privat.

Berlanjut pada tanggal 7 November 2018, Kementerian PANRB membuktikan realisasi yang cepat dari hasil *open government partnership* di Korea, melalui penyelenggaraan ***The International Public Service (IPS) Forum*** yang dibuka oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Forum ini disambut antusias oleh seluruh masyarakat, praktisi pelayanan publik, para inovator bahkan banyak pejabat penting dari pemerintahan negara luar.

Dari sini kita membuktikan bahwa, **Indonesia sudah berkembang ke arah yang maju dan modern**. Inovasi pelayanan publik di Indonesia tidak kalah dengan negara lain, bahkan banyak surplus dari IPS Forum, berupa peningkatan kerja sama antar - negara dalam percepatan reformasi birokrasi, pertukaran pengetahuan dan penguatan kepemimpinan di bidang pelayanan publik, serta yang terpenting produk - produk pelayanan publik Indonesia benar - benar dapat dipublikasikan, diketahui masyarakat, serta mendekatkan kehadiran negara di berbagai sektor strategis kehidupan rakyat.

Birokrasi yang dahulu kita kenal dengan *bureucracy* - asalnya dari prancis - birokrat yang berbelit, sulit melayani, dan tidak memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat. **Sekarang hal tersebut semakin berubah** ke arah yang lebih *entrepreneur*, yang lebih memastikan orientasi hasil ketimbang aturan yang berbelit. Inilah bentuk birokrasi modern yang mengkombinasikan prinsip - prinsip pada pemerintahan dengan percepatan hasil, seperti layaknya sistem pada dunia usaha.

Kami sadari, **tidak ada sesuatu yang sempurna**, kerja keras ini masih menyisakan ruang yang perlu diselesaikan bersama, untuk masa depan birokrasi dan tata kelola pemerintahan negara yang mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat. **Harapan saya**, semoga kerja sama yang dibangun antara Kementerian PANRB dan Universitas Indonesia dapat mendorong percepatan program reformasi birokrasi, dan mampu mewujudkan *platform* perubahan yang fundamental bagi seluruh aspek



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

pemerintahan negara. Semoga perjalanan “bahtera” birokrasi Indonesia benar - benar membawa kemakmuran bagi rakyat.

Sekian dan Terima Kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**KEYNOTE SPEECH SEMINAR NASIONAL
“GRAND DESIGN PUBLIC ADMINISTRATION INDONESIA 2045”**

JAKARTA, 14 NOVEMBER 2018

Yang terhormat:

- Kepala Lembaga Administrasi Negara, Bapak Adi Suryanto;
- Para Pejabat Pada Kementerian/Lembaga;
- Para Pembicara; serta
- Hadirin yang Berbahagia.

Assalamua‘Alaikum, Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Marilah memanjatkan **puji syukur** kehadirat *Allah Subhanahu Wata’ala*, karena atas limpahan karunia-**Nya**, kita dapat hadir dalam keadaan sehat wal’afiat, untuk *sharing* dan diskusi pemikiran dalam seminar nasional **“Grand Design Public Administration Indonesia 2045”**.





Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,

Dalam konteks kebangsaan, untuk mencapai tujuan nasional, sarana koordinasi utama penggerak sendi pemerintahan adalah **sistem administrasi negara**, yang dalam sejarahnya (di Indonesia) telah mengalami transformasi signifikan seiring tumbuhnya peradaban dan perkembangan zaman. Dulu, kita kenal model **state centered public administration** → lalu pernah memasuki masa **birokrasi yang monocratique** → kini, di era reformasi, di zaman demokrasi yang semakin matang, modelnya cenderung berorientasi pada **society centered public administration**, sehingga **mekanisme tata kelola pemerintahan secara pasti bersanding kuat dengan kerangka mekanisme pasar (private sector)** serta **mekanisme sosial (civil-society)**. Kombinasi 3 (tiga) aspek inilah yang menjadi pilar penopang hadirnya **administrasi publik** yang menjawab ekspektasi masyarakat, pelayanan publik yang menjawab kebutuhan dan orientasi publik (*public need and orientation*), birokrasi bebas KKN, profesionalisme SDM aparatur, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang makin maju dan mampu bersaing di tengah hadirnya turbulensi global.

Inti dari administrasi publik yang diselenggarakan negara adalah **birokrasi pemerintahan**, dan inti dari birokrasi pemerintahan tentu adalah pelayanan publik. Hingga saat ini telah dilakukan berbagai penyempurnaan melalui kebijakan publik yang konsisten terhadap perubahan, yang membuat birokrasi adaptif merespons fase kritis, sehingga *outcome* reformasi birokrasi bukan lagi hanya ditujukan untuk mengubah/mendapatkan birokrasi profesional, tetapi lebih penting lagi - berdaya ungkit optimal bagi peningkatan kepercayaan masyarakat, berdampak luas bagi pemerataan hasil pembangunan, mendekatkan negara untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat, serta meletakkan pondasi kebangsaan yang utuh untuk memenangkan persaingan dunia.

Bapak/Ibu hadirin yang saya hormati,

Pemerintah melalui Bappenas telah merumuskan **visi Indonesia 2045**, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur, melalui penancangan **4 (empat) pilar**: 1) pembangunan SDM dan penguasaan IPTEK; 2) pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; 3) pemerataan pembangunan; dan **4) ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan**, yang ditopang oleh Pancasila dan UUD 1945.

Desain visi tersebut adalah haluan besar bagi bangsa dalam menghadapi gelombang dan dinamika **megatrends global** di masa mendatang. Wajah dunia yang *borderless*, semakin dihadapkan pada ruang **kompleksitas dan ketidakpastian** di semua aspek kehidupan. **Populasi global diprediksi melonjak tajam dari 7,35 miliar (2015) menjadi 9,45 miliar di tahun 2045**. Jumlah penduduk terbanyak adalah Benua Asia, mengakibatkan terjadinya migrasi dan urbanisasi global, berdampak tumbuhnya banyak kota kecil dan mega urban, populasi makin padat di perkotaan serta memicu instabilitas. Ledakan populasi juga menyedot kapasitas daya dukung bumi yang makin besar untuk kehidupan, berubahnya titik kesetimbangan antara produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan, menggerus sumber energi dunia, bahkan memicu polemik baru



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

karena beralihnya pilihan ke industri nuklir. **Perubahan iklim** mengganggu ketersediaan air bersih, mengubah keseimbangan ekosistem, memicu bencana yang merusak bahkan mendegradasi lingkungan hidup.

Revolusi teknologi yang masif juga menciptakan **disrupsi**, bukan hanya pada *landscape* sosial, tetapi juga berdampak pada kesenjangan dan terciptanya tantangan baru di sektor swasta maupun publik. Penggunaan **internet of things, big data, artificial intelligence** yang multifungsi untuk kehidupan mengancam tergantikannya peradaban manusia oleh dunia yang makin modern.

Lalu bagaimanakah arah administrasi publik, yang konteksnya “birokrasi pemerintahan” diarahkan, untuk menjaga negara, bangsa, dan masyarakat tetap survival - terikat kuat pada tujuan dan cita - cita nasional itu ?

Kembali pada **the basic concept** bahwa reformasi birokrasi berkaitan dengan reposisi berbagai *overlapping* antar fungsi pemerintahan, pembangunan kualitas jutaan pegawai, membangun *good governance - clean and open government*, butuh perubahan paradigma melalui proses panjang, pola pikir harus berubah ke arah *entrepreneurship bureaucracy*, lebih memprioritaskan hasil tanpa mengabaikan aturan (*outcomes oriented program*), upayanya pun harus *extraordinary*, melibatkan seluruh elemen negara, sektor privat dan dukungan masyarakat.

Selain itu, dibutuhkan pula penerapan sistem manajemen perubahan (*change management*), manajemen pengetahuan (*knowledge management*), serta penguatan di semua area perubahan secara simultan, baik organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur.

Oleh karenanya, **benar-benar tepat sejak sekarang**, sebelum berakhirnya **grand desain reformasi 2010 - 2025** (sebagaimana tercantum dalam **Perpres 81/2010** tentang **Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 - 2025**), sudah mulai disusun **blue print/ grand design public administration yang berkelanjutan hingga 2045**.

Hingga **2025**, **road map reformasi birokrasi** masih ditujukan untuk pencapaian sasaran peningkatan kapasitas birokrasi yang berkelanjutan, serta **terwujudnya birokrasi berkelas dunia**. Posisi ini ditandai oleh infrastruktur birokrasi yang solid dan kokoh, struktur birokrasi yang ramping, berlakunya *e-government*, berbasis human capital management, budaya ASN berorientasi *citizen demand*, berwawasan global dan *merit based system*.

Lalu, untuk visi Indonesia 2045, Bappenas telah menggariskan haluan **reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan tahun 2026 - 2035** → struktur birokrasi yang berbasis *outcome, open government* untuk mengintegrasikan silo - silo pelayanan publik, pelayanan berorientasi kepuasan dan pelibatan masyarakat, dan ASN semakin kompetitif. **Tahun 2036 - 2045** → diharapkan pemerintah mengambil posisi penting sebagai regulator dan fasilitator pembangunan, struktur pemerintahan lebih fleksibel, adaptif dan lintas sektor, *people driven, internet worked government and locally empowered*, tata kelola pemerintah inklusif dan kolaboratif, serta pelayanan publik yang cepat dan mudah terjangkau.



Seluruhnya itu, saya tegaskan, adalah jalur untuk mencapai Indonesia yang maju dan berdaya saing tinggi. Kita harus tetap optimis dan jangan berpikir pesimis, jangan berkata tidak, tetapi ini peluang untuk menunjukkan bangsa ini mampu dan posisi/titik pijak reformasi birokrasi Indonesia sekarang sudah di rel tepat, kita makin mumpuni memasuki etape itu.

Saya jabarkan, sejak 2015 hingga akhir semester I 2018, **indeks persepsi pelayanan publik** dan **indeks persepsi anti korupsi** telah diperbaiki, sehingga menunjukkan tingkat perkembangan instansi pemerintahan dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik, yang **terus meningkat**, baik di setiap K/L maupun pemerintahan provinsi, kota, dan kabupaten. Nilai rerata **indeks reformasi birokrasi trennya meningkat** → pada **K/L meningkat dari 65,78** (tahun 2015) menjadi **71,91** (tahun 2017); pada **pemerintah provinsi meningkat dari 41,61** (tahun 2015) menjadi **60,47** (tahun 2017); pada **kabupaten/kota meningkat dari 42,96** (tahun 2015) menjadi **64,61** (tahun 2017).

Capaian tersebut, mendongkrak berbagai indeks kebangsaan Indonesia di mata dunia, yaitu:

- 1) *world economic forum* mencatat **indeks daya saing nasional naik 5 peringkat** dari ranking 41 (2016) ke **ranking 36** (2017);
- 2) *world bank* mencatat **indeks kemudahan berusaha naik 19 peringkat** dari ranking 91 (2016) ke **ranking 73** (2019);
- 3) *transparency international* mencatat **indeks persepsi korupsi tetap stabil pada skor 37**; serta
- 4) *world bank* mencatat **indeks efektivitas pemerintah tahun 2016 naik 17 peringkat** dibandingkan tahun 2015.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), juga menggeser grafik **kategori peringkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah** yang pada **tahun 2015** kecenderungannya: **A → 7, BB → 35, B → 75, CC → 201, C → 242, D → 15**, pada **tahun 2017** kecenderungan rapornya makin baik yaitu: **A → 16, BB → 62, B → 198, CC → 196, C → 138, D → 3**. Artinya, banyak instansi pemerintah mengalami perbaikan, karena semakin efisien melalui penghematan anggaran pemerintah sebanyak **41,15 triliun rupiah** di tahun 2017.

Selain itu, tahun 2017 telah dibangun **109 unit percontohan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** dan **18 unit percontohan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)**, lalu hingga akhir semester I tahun 2018, sudah diusulkan sebanyak **910 satuan kerja pelayanan** untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Secara khusus, fokus pembangunan **zona integritas tahun 2018 adalah pada sektor penegakan hukum** (Polres, Kejari dan Mahkamah Agung) untuk mengintegrasikan sistem percepatan penanganan perkara, serta **unit pelayanan BPN/ATR (kantor pertanahan)** dan **kecamatan**.



Hadirin yang saya hormati,

Satu pola pikir penting yang perlu digarisbawahi, **kita tidak boleh berpuas dengan capaian kemajuan diatas**, masih banyak tugas yang berat di masa mendatang untuk penguatan serta kinerja birokrasi Indonesia yang lebih baik di level nasional, regional, apalagi internasional.

Indonesia memiliki yurisdiksi yang luas, budaya, dan karakteristik beragam, tingkat kemajuan reformasi birokrasi antar wilayah pun masih berbeda - beda, maka inilah **pentingnya mencanangkan *road map* atau grand desain yang berlaku secara nasional namun tetap adaptif mengabsorpsi keberagaman setiap lembaga dan daerah.** Fokus dan prioritas adalah dua kunci utama yang perlu dikuatkan dalam birokrasi, dengan berfokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan sekaligus prioritas solusinya, apalagi yang sifatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Apa yang sudah efektif dirasakan agar dipertahankan dan di-*update* terus, sedangkan apa yang sudah usang/tidak relevan harus diganti yang baru, sehingga realisasinya dapat makin strategis dan komprehensif dalam mengarahkan postur birokrasi yang menjawab tantangan kedepan.

Dan lagi - lagi hal mendasar yang terpenting dari itu semua adalah **pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai aset utama kemajuan bangsa**, kita jangan berpikir lagi bahwa Indonesia luas geografinya besar, dengan sumber daya alam melimpah, *namun jika kualitas SDM yang kurang, siapa yang akan mengelola itu semua?* Indikator pembangunan negara sangat bertumpu pada **Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang kondisinya di Indonesia (2016),**



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

menurut hasil asesmen/penelitian **UNDP**, masih menduduki peringkat 113 dari 188 negara dengan **nilai indeks komposit 0,689**, Indonesia masih tergolong “*negara dengan pembangunan manusia sedang*”. **Ibarat busur panah, mengasah anak panah birokrasinya, kita juga harus menguatkan SDM nya (busurnya)**, yang mendorong akselerasi pencapaian birokrasi Indonesia mengarahkan bangsa yang bermartabat.

Pada akhirnya, saya menitipkan **5 (lima) pesan penting sebagai intisari, yang perlu dibahas untuk Grand Desain Administrasi Publik 2045**, yaitu:

- 1) sistem dan tata laksana birokrasi harus ditata ulang agar efisien, responsif serta mengoptimalkan pencapaian kinerja pelayanan publik;
- 2) fungsi birokrasi harus dikuatkan sebagai regulator dan fasilitator pembangunan serta pilar utama pemerintahan;
- 3) organisasi birokrasi yang inovatif dan adaptif harus dikembangkan;
- 4) SDM aparatur negara yang berintegritas dan berkompeten harus dikembangkan sebagai pendorong dan penggerak reformasi birokrasi, pembangunan dan persatuan; serta
- 5) peran birokrasi harus mendukung sinergi, integrasi, dan kolaborasi serta keterpaduan antar aktor dan *stakeholders* pembangunan.

Saya mengucapkan apresiasi untuk Lembaga Administrasi Negara atas terselenggaranya seminar ini. **Perencanaan yang baik sudah menyelesaikan 90% pekerjaan di masa mendatang**, maka besar harapan, seminar ini, menjadi sebuah langkah penting untuk memberi masukan dan saran yang konstruktif bagi penyusunan Grand Desain *Public Administration* Indonesia 2045, untuk pemerintahan Indonesia yang kuat, berdaya saing, berwibawa, dan memiliki peran penting dalam berbagai aspek pergaulan di dunia global.

Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
HUMAN CAPITAL DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0
JAKARTA, 14 NOVEMBER 2018**



Yang saya hormati:

- Para Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Para Taruna Poltekim dan Poltekip; serta
- Hadirin yang Berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat *Allah SWT*, karena berkat hidayah-Nya, kita masih dapat berkumpul di ruangan ini, di depan generasi penerus aparatur negara yang spesialis pada keilmuan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, garda terdepan bagi tergelarnya fungsi pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Tema dalam kuliah umum, yaitu **“Arah dan Strategi Kebijakan Pengembangan *Human Capital* Dalam Revolusi Industri 4.0”**, sungguh tepat dihadirkan sebagai penambahan wawasan bagi calon aparatur negara untuk menatap tantangan di masa mendatang - era industri 4.0.



Hadirin yang berbahagia,

Berdiri didepan pemuda harapan bangsa, saya teringat *the founding fathers* bangsa Soekarno pernah berkata "*beri aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncangkan dunia*". Filosofinya sangat dalam - bahwa tulang punggung kemajuan bangsa yang bermartabat dan sejahtera, terletak pada generasi mudanya yang semakin tangguh, profesional, berkarakter, berdaya saing tinggi dan mampu menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks di masa mendatang. Sejarah membuktikan, Jepang membangun negaranya menjadi maju melalui Restorasi Meiji yang bertumpu pada generasi baru yang gigih dan ulet dan mengadopsi perubahan, begitupula Eropa yang generasinya menghadirkan banyak penemuan teknologi sehingga mendorong revolusi industri, begitupula di Timur Tengah perlintasan kerajaan dan dinasti besar beralih ke generasi yang semakin modern, Yordania, Arab Saudi, Dubai, Uni Emirate Arab menjadi kekuatan penting peradaban ekonomi dunia sekarang.

Lalu, konteks Indonesia membangun negara yang maju, sudah tergambar jelas dari visi Indonesia 2045, yang landasannya bertumpu pada: pertama, kekuatan demografi yang didominasi oleh usia produktif (generasi muda) sehingga ketersediaan SDM berkualitas di Indonesia sangat berlimpah untuk memutar roda negara, masyarakat, dan sektor privat. Kedua, jaminan bagi stabilnya pertumbuhan perekonomian nasional diatas 7%, sehingga mampu memberikan ruang besar bagi berjalannya ekonomi, meningkatnya investasi, terciptanya lapangan pekerjaan, dan berdampak bagi peningkatan pendapatan perkapita sebagai tolak ukur kesejahteraan.

Oleh karenanya, posisi anda sebagai generasi penerus bangsa, sangat penting, dan lebih penting lagi karena tugas sebagai aparatur negara, yang sifatnya memiliki kekhususan yaitu keimigrasian dan pemyarakatan, erat dengan stabilitas keamanan, ketahanan, dan pemulihan kondisi masyarakat dari kejahatan yang membayangi peradaban di Indonesia.

Perihal keamanan dan ketahanan, semua *stakeholder* perlu memandang sisi kebangsaan yang utuh, butuh sinergi dan koordinasi yang kuat, dan perlu dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif. Bayangkan bagaimana luas geografi dan perbatasan Indonesia terluar, ribuan gugus pulau *untaian ratna mutu manikam bangsa* yang dapat berpotensi sebagai pintu - pintu masuknya ancaman dari luar terhadap negara kita.

Petugas imigrasi tidak sekadar patuh menjalankan perintah saja, tapi juga bersikap kritis dan cermat. Bukan hanya administratif mengurus paspor, tapi juga aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta karib dengan perkembangan informasi dunia. Indonesia memiliki tak terbilang pintu-pintu masuk, ada pintu resmi dan ada pintu perlintasan yang secara tradisional semenjak dulu kala sudah dilewati para pelintas batas. Di tempat-tempat ini terdapat pos lintas batas yang juga dijaga para petugas imigrasi, dengan banyaknya pintu perlintasan itu, Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat dunia yang beradab, menjadi salah satu titik simpul perjalanan manusia - baik sebagai tujuan maupun sekadar lokasi transit.

Bersama melintasnya jutaan manusia itu setiap tahunnya, ikut pula terbawa aneka ragam kebudayaan, lagak-laku yang benar dan salah, niat baik dan buruk, tentu juga kebaikan dan kejahatan. Kedaulatan Indonesia pada akhirnya ditentukan oleh tegaknya hukum kita di atas seluruh wilayah Indonesia terhadap siapa pun yang



memasukinya. Kemampuan menegakkan kedaulatan negara lewat tugas dan tindakan imigrator bukan sekadar ditunjukkan lewat seragam dan perangkat pemeriksaan semata - mata, tapi melalui kemampuan, pengetahuan dan perangkat yang melengkapinya.

Pun demikian pula dalam konteks pembinaan warga yang bermasalah hukum di lembaga pemasyarakatan, mereka yang dikategorikan penjahat semakin beradaptasi dengan perkembangan jaman, mengubah modus - modus kejahatan menjadi semakin terbaru,

Film *Escape from Alcatraz*, kisah nyata tahanan yang berhasil melarikan diri dari pulau penjara di Amerika Serikat itu. Sang kepala penjara berkata kepada Frank Morris (yang dibintangi Clint Eastwood), "Alcatraz dibangun untuk menyimpan telur-telur busuk dalam satu keranjang, dan tugas saya adalah memastikan bau busuknya tidak keluar."

Saya mengingat dialog ini justru karena saya berpendapat sebaliknya. Lembaga pemasyarakatan, penjara, bui, hotel prodeo atau apapun sebutannya bukan tempat menyimpan "telur busuk" atau apapun yang berbau tak sedap. Sebaliknya, lembaga pemasyarakatan adalah tempat membina penghuninya menjadi warga yang baik, yang "harum" dan tidak lagi melanggar hukum.

Dulu, abad 12, Raja Henry II dari Inggris membangun ruang-ruang khusus bagi tahanan yang hendak dihadapkan pada pengadilan, baru sebatas kurungan badan belaka. Abad ke-16 penjara sebagai lembaga pemasyarakatan mewujudkan berupa *London's Bridewell* dan *Ghent House of Correction* serta sejumlah LP di tanah koloni di Amerika Serikat.

Awal abad ke-18, *penjara Eastern State Penitentiary di Philadelphia* mulai meyakini bahwa dalam kesunyian dan kesendirian, para napi akan merenungi kesalahan masa lalu mereka dan bertobat, sehingga narapidana diberikan keterampilan mengayam sepatu. Tahun 1840, *Kapten Alexander Maconochie* di Kepulauan *Norfolk*, *sebelah timur Australia* memperkenalkan sistem penilaian seperti pada anak sekolah. Para napi dinilai pekerjaan dan sikapnya dan kemudian dicantumkan dalam "rapor" yang bisa mempengaruhi masa hukumannya.

Sistem ini kemudian diterapkan di berbagai penjara di dunia, juga di negeri kita, yang berimbas pada pengurangan masa hukuman, dan itulah mengapa narapidana disebut sebagai warga binaan. Seusai masa hukuman, mereka akan kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Lalu pertanyaan kritisnya: apakah kualitas SDM aparatur negara yang *core business*-nya menangani masalah ini harus berjalan ditempat? Justru sebaliknya, butuh pengembangan kapasitas yang lebih strategis untuk mengantisipasi berbagai tantangan dan dampaknya yang destruktif bagi kelangsungan bangsa ke depan.

Hadirin yang berbahagia,

Tanggal 2 November 2018, saya ikut hadir *ground breaking* gedung Poltekip dan Poltekim di Tangerang. Saya teringat saat menjabat sebagai Kalem diklat Polri, mengampu pendidikan Polri termasuk para taruna akademi kepolisian. Maka tidak asing bagi saya untuk memahami nuansa pendidikan yang juga diterapkan di Poltekip dan Poltekim. Para taruna disiapkan fisik dan jiwanya, untuk lahir ke fitrahnya sebagai aparatur negara, abdi negara. Artinya, perlu *switch paradigm* dari yang orientasinya



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

sebagai masyarakat, sekarang orientasinya menjadi pelayan masyarakat, perpanjangan tangan negara, menjalankan tugas pemerintahan, menjadi ASN yang profesional.

Saat ini, semua lembaga pendidikan, bertujuan mewujudkan pendidikan yang berkelas dunia, agar hasil didiknya juga berkualitas kelas dunia. Maka, tentu ini selaras dengan *road map* reformasi birokrasi 2020 - 2024 yang bertujuan mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berkelas dunia.

Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa menghindari *megatrends global* yang selalu menghadirkan perubahan dan ketidakpastian. ASN semakin disiapkan untuk menjawab tingginya ekspektasi masyarakat atas peningkatan kualitas pelayanan publik, serta drastisnya perubahan di era industri 4.0., dimana peran mesin dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) semakin dominan, jejaring dan fisik, serta kehidupan serba berubah oleh *platform internet (internet of things)*.

Disisi lainnya, reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik ini, bukan berarti tidak meninggalkan persoalan. Masih banyak hal - hal klasik terjadi seperti tingginya *mismatch* antara jabatan ASN dengan ketersediaan potensi kewilayahan, komposisi ASN masih didominasi jabatan administrasi umum, profesionalitas ASN yang perlu di-*upgrade* terus, serta problem disiplin.

Oleh karenanya, kebijakan pembangunan SDM aparatur berbasis sistem merit yang lebih mengutamakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, semakin menjadi acuan, dan profil *smart* ASN semakin menjadi idola, yakni sosok SDM aparatur yang berintegritas dan profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa nasionalisme, ramah dan melayani (*hospitality*), mempunyai jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*), serta *networking* yang luas.





Hadirin yang berbahagia,

Melihat urgensi penciptaan aparatur negara tersebut, idealnya pola pikir dan cara pandang keberadaan ASN sebagai pegawai yang digerakkan oleh aturan (*rule based*), harus diubah ke posisi pegawai yang berorientasi kepada kinerja (*performance based*). Karena itulah, arah kebijakan pembangunan ASN ke depan perlu dikembangkan berdasarkan prinsip dasar *human capital management*, sebagai berikut:

1. **Perencanaan ASN** didasarkan arah pembangunan nasional dan potensi daerah, dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, berbasis data yang komprehensif (data struktural maupun data analitik yang sifatnya *realtime - big data* ASN).
2. **Pengadaan pegawai** melalui rekrutmen dan seleksi yang transparan dan akuntabel. Kita sudah berlakukan *Computer Assisted Test* (CAT); lalu ada *assessment* berbasis kompetensi untuk seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT); serta rekrutmen *talent scouting*, profesional, dan pola inklusif lainnya.
3. **Pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN** yang berkeadilan melalui ***training need analysis*** untuk memperkecil *gap* kompetensi, serta mengembangkan **ASN Corporate University** yang diintegrasikan dengan manajemen talenta nasional.
4. **Penilaian kinerja dan remunerasi yang tepat**, berdasarkan kompetensi dan kinerja.
5. **Promosi, rotasi, dan pola pengembangan karir** yang didesain berdasarkan sistem merit, memperhatikan kebutuhan nasional, serta *talent pool* untuk promosi, rencana pengembangan karir dan pengembangan kompetensi.
6. **Sistem pensiun** dengan rasio penggantian yang layak, didanai secara penuh (*fully funded*), serta jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya yang jauh lebih baik.

Hadirin yang berbahagia,

Pengembangan kompetensi ASN bukan hanya dilakukan secara manual, rutin dan berkala, tetapi komprehensif melingkupi aspek sarana dan prasarana, kurikulum, widyaiswara maupun metode yang digunakan. Kementerian PANRB mengembangkan *ASN Corporate University* dengan melibatkan revitalisasi lembaga diklat ASN seperti LAN dan lembaga diklat instansi, yang tujuannya untuk memberikan ruang dan suasana sistem pembelajaran bagi ASN yang lebih baik, terbuka, dan inovatif.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur pengembangan karier PNS mendasari kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah, serta integritas dan moralitasnya. Dibutuhkan 3 (tiga) jenis kompetensi yaitu:

- 1) **Teknis**, yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja teknis;



- 2) **Manajerial**, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan); dan
- 3) **Sosial kultural**, yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Integritas ASN dapat diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan moralitas ASN diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

Inilah postur yang harus dicapai oleh para taruna, selama menempuh pendidikan di Poltekkip dan Poltekim, agar begitu kelulusannya nanti, sudah siap menjadi ASN yang langsung terjun bertugas di lapangan.

Tugas nyata oleh negara dan bangsa sudah menanti, kompleksitas, dinamika, dan turbulensi akan dihadapi, maka persiapkan diri sebaik mungkin, belajar dengan rajin, giat dalam berlatih, dan matangkan diri dengan berbagai pengetahuan teknis yang *adaptable* terhadap perubahan. Kembangkanlah kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan lain - lain. Apalagi pembangunan gedung Poltekkip dan Poltekim yang baru nanti, akan menyediakan sarana prasarana yang cukup bagi terintegrasinya pendidikan, penelitian serta pengembangan kompetensi aparatur keimigrasian dan pemasyarakatan.





MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Terakhir dan terpenting, saya menyampaikan hasil survei oleh Delloite di 70 negara terhadap 1.200 pegawai pemerintah, hasilnya menunjukkan bahwa *“teknologi digital telah berdampak signifikan bagi perubahan cara dan pola kerja pemerintah, sebanyak 76% dari pimpinan yang disurvei melihat teknologi digital mendorong terjadinya perubahan”*. Ini menandakan kecenderungan pemanfaatan teknologi digital berkembang pesat, apalagi separuh lebih populasi Indonesia adalah pengguna internet. Sehingga kunci utama keberhasilan merespon perubahan tentu terletak pada kemampuan ASN dalam birokrasi dalam mengimplementasikan teknologi untuk inovasi - inovasi yang melayani rakyat.

Tanggal 5 November 2018, saya menghadiri Open Government Partnership (OGP) regional Asia Pasifik, yang memberi inspirasi besar bagi pemerintah Indonesia untuk berkomitmen mendorong pemerintahan yang semakin transparan, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seluruh pimpinan delegasi saling berbagi pengalaman dan mengeksplorasi strategi menuju pemerintahan terbuka untuk memperbarui kepercayaan publik melalui inovasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor privat, serta melalui pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Secara khusus, saya ucapkan apresiasi kepada Kemenkumham yang telah meraih penghargaan Top 44 Inovasi di Bidang Pelayanan Publik, yang sifatnya terbarukan, memberikan hasil nyata, bermanfaat luas untuk masyarakat bahkan teruji keberlanjutannya. Beberapa unit kerja pada Ditjen Imigrasi telah meraih kategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM), sebagai landasan kuat bagi pencanangan zona integritas, yang saya yakini - akan menjadi proyek percontohan, dan berkembang ke seluruh unit kerja lainnya, akhirnya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi secara menyeluruh di Kementerian Hukum dan HAM.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan *Allah SWT* senantiasa meridhoi kinerja kita untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



**PERAN KEPALA DAERAH DALAM PEMBINAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
JAKARTA, 14 NOVEMBER 2018**



Yang saya hormati:

- Menteri Dalam Negeri, Bapak Tjahjo Kumolo;
- Sekjen Kemendagri;
- Kepala Badan Pengembangan SDM Kemendagri;
- Para Bupati/Wali Kota, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota; serta
- Hadirin yang Saya Banggakan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Marilah memanjatkan puji syukur kehadiran *Allah SWT*, karena atas rahmat dan karunia-Nya, serta atas prakarsa BPSDM Kemendagri, kita dapat menghadiri acara pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri pada tahun 2018, sebagai momentum penyamaan frekuensi berpikir dan cara pandang para unsur pimpinan



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

pemerintahan daerah dalam mengantisipasi tantangan kebangsaan global, menjalankan berbagai kebijakan nasional maupun otonomi, serta berjuang melalui penyelenggaraan pemerintahan yang memajukan daerah, mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Saya ucapkan selamat kepada para pimpinan daerah terpilih untuk masa tugas selama beberapa periode ke depan, semoga ini adalah ladang dan amal ibadah melalui pengabdian kita untuk negeri.

Bapak dan ibu, hadirin yang saya hormati,

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyiratkan bahwa konstruksi kenegaraan Indonesia sebagai negara kesatuan yang menerapkan prinsip - prinsip otonomi daerah, maka pemerintah harus memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya terwujud pada tataran nasional/pusat saja, tetapi konsisten berjalan di seluruh pemerintahan daerah. Tidak boleh ada satupun wilayah di Indonesia yang terlambat membangun akibat buruknya kualitas tata kelola pemerintahan. Apalagi ke depan, turbulensi global semakin mengarah pada ketidakpastian, sehingga *grade* tuntutan masyarakat dan dunia usaha atas pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik semakin menguat.

Konsekuensinya, pemerintah sebagai manifestasi negara harus mereformasi semua aspek birokrasi, baik berupa karakter kepemimpinan; kompetensi, kapasitas, budaya dan cara kerja ASN; penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik; infrastruktur dan sarana prasarana birokrasi; struktur kelembagaan birokrasi; dll. Hal itu adalah sistemnya, tetapi agar sistem itu berjalan cepat, butuh sumber daya manusia yang handal dan profesional menjalankan sistem. Merekalah aset utama yang dinamis dan mampu berevolusi cepat, bukan dalam hal fisik, tetapi kinerjanya dan bagaimana dirinya menggerakkan perubahan di dalam birokrasi. Saya menyebutnya, *autosistem reform* melalui manajemen perubahan dan manajemen pengetahuan. Inilah latar belakang garis besar pendayagunaan aparatur negara yang harus dibangun konsisten dan sejalan dengan reformasi birokrasi di Indonesia, dalam memenangkan persaingan global.

Konteks pembinaan manajemen PNS di daerah adalah terikat pada satu kesatuan penyelenggaraan manajemen PNS secara nasional. Peran kepala daerah bukan hanya sekedar pembina, namun dirinyalah yang berperan sentral dalam merancang, memberikan *coach* dan motivator, mengalokasikan sumber daya manusia sesuai kebutuhan tugas, serta menjadi pionier bagi pembangunan budaya kerja birokrasi daerah yang baik, kreatif, inovatif, berintegritas dan profesional. Intinya, pembangunan berkelanjutan, membutuhkan pola kepemimpinan yang tepat dalam menjalankan reformasi administrasi dan perlu berkombinasi dengan peningkatan kapasitas SDM aparatur negara dan kualitas pengelolaannya.



Bapak dan ibu, hadirin yang saya hormati,

Sejak 2015 hingga akhir semester I 2018, indeks persepsi pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi telah diperbaiki, sehingga menunjukkan tingkat perkembangan instansi pemerintahan dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik, yang terus meningkat, baik di setiap K/L maupun pemerintahan provinsi, kota, dan kabupaten. Nilai rerata indeks reformasi birokrasi trennya meningkat → pada K/L meningkat dari 65,78 (tahun 2015) menjadi 71,91 (tahun 2017); pada pemerintah provinsi meningkat dari 41,61 (tahun 2015) menjadi 60,47 (tahun 2017); pada kabupaten/kota meningkat dari 42,96 (tahun 2015) menjadi 64,61 (tahun 2017).

Capaian tersebut, mendongkrak berbagai indeks kebangsaan Indonesia di mata dunia, yaitu:

- 1) *world economic forum* mencatat indeks daya saing nasional naik 5 peringkat dari ranking 41 (2016) ke ranking 36 (2017);
- 2) *world bank* mencatat indeks kemudahan berusaha naik 19 peringkat dari ranking 91 (2016) ke ranking 73 (2019);
- 3) *transparency international* mencatat indeks persepsi korupsi tetap stabil pada skor 37.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), juga menggeser grafik kategori peringkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang pada tahun 2015 kecenderungannya: **A → 7, BB → 35, B → 75, CC → 201, C → 242, D → 15**, pada tahun 2017 kecenderungan rapornya makin baik yaitu: **A → 16, BB → 62, B → 198, CC → 196, C → 138, D → 3**. Artinya, banyak instansi pemerintah mengalami perbaikan, karena semakin efisien melalui penghematan anggaran pemerintah sebanyak 41,15 triliun rupiah di tahun 2017. Catatan khusus, terdapat 312 pemerintah kabupaten dan kota yang masih pada rentang nilai SAKIP CC, C, dan D sehingga perlu upaya sangat kuat dan masif bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansinya (Hal ini merupakan PR bagi bapak dan ibu, catatan yang harus diperbaiki untuk kinerja di tahun-tahun mendatang).

Selain itu, tahun 2017 telah dibangun 109 unit percontohan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 18 unit percontohan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), lalu hingga akhir semester I tahun 2018, sudah diusulkan sebanyak 910 satuan kerja pelayanan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Secara khusus, fokus pembangunan zona integritas tahun 2018 adalah pada sektor penegakan hukum (Polres, Kejari dan Mahkamah Agung) untuk mengintegrasikan sistem percepatan penanganan perkara, serta unit pelayanan BPN/ATR (kantor pertanahan) dan kecamatan.

Bapak dan ibu, hadirin yang saya hormati,

Kita tidak boleh berpuas dengan capaian kemajuan diatas, masih banyak tugas yang berat di masa mendatang dalam penguatan serta kinerja birokrasi Indonesia yang lebih baik di level nasional, regional, apalagi internasional. Ada catatan yang perlu



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

diperbaiki, dan sekali lagi kunci perbaikan ini ada di pundak anda sebagai kepala pemerintahan di daerah.

Sebelumnya, di LAN, saya menyampaikan pandangan tentang *Grand Desain Administrasi Publik 2045*, saya berikan catatan khusus bahwa salah satu pilar yang harus segera direalisasikan untuk mendorong akselerasi pencapaian birokrasi Indonesia yang berkelas dunia, yang mengarahkan bangsa bermartabat, adalah SDM aparatur negara yang berintegritas dan berkompeten harus dikembangkan sebagai pendorong dan penggerak reformasi birokrasi, pembangunan, dan persatuan.

Untuk itu, ada 3 (tiga) agenda besar yang perlu dilakukan, yaitu:

- 1) melakukan *excercise* dan redistribusi ASN untuk memperluas akses layanan publik sampai ke pelosok;
- 2) memperbaiki peringkat indeks efektivitas pemerintah; dan
- 3) memberantas tuntas praktik negatif pada proses manajemen ASN (rekrutmen, seleksi, promosi, mutasi, dll).

Dalam konteks makro, jumlah PNS sekarang mencapai 4,37 juta orang, yang tersebar di total 696 kementerian, lembaga, dan daerah. Persebaran demografi PNS masih belum ideal, karena kelompok fungsional administrasi umum mendominasi mencapai 43%, lainnya: 38% tenaga guru, 6% tenaga kesehatan, 10% pejabat struktural manajerial, hanya 8% tenaga teknis operasional. Modus usia 51 tahun mencapai 20,36%, dan JPT kategori *low competence and performance* mencapai 34,5%. Artinya, postur ASN belum mampu menyangga daya saing bangsa yang dibutuhkan untuk mengantisipasi *megatrends global* di masa mendatang. Di sisi lainnya, (walaupun terjadi penghematan di tahun 2017), tren alokasi belanja pegawai justru terus meningkat, tren Indeks Efektivitas Pemerintah (IEP) Indonesia dalam 10 tahun terakhir memang meningkat tetapi perlahan → berturut turut 47,3 (2014); 53,8 (2015); 45,6 (2016); 52,8 (2017); dan 54,8 (2018).

Ke depan, Indonesia harus berjuang lebih gigih jika tidak ingin tertinggal dari 3 (tiga) pemain besar di Asia, yakni Amerika Serikat, Cina dan India. Kita tahu, bagaimana prediksi bonus demografi yang ditunjang stabilitas ekonomi dapat mengantarkan Indonesia menjadi kekuatan terbesar ke - 4 di dunia pada tahun 2045 → itu visinya, itu tujuannya, namun realita performanya, Indonesia perlu mengejar ketinggalan melalui perjuangan yang ekstra berat. Kita menginginkan birokrasi negara ini mampu lebih tajam memfokuskan dan memprioritaskan penguatan di berbagai sektor, jangan sampai kita kalah posisinya dengan Mongolia, Myanmar, dll. Indonesia membutuhkan penguatan yang lebih progresif pada komponen pelayanan publik, derajat independensi birokrasi pemerintah terutama daerah yang bebas intervensi politik, kualitas formulasi, dan implementasi kebijakan serta kredibilitas yang dinilai dari zona integritas.

Oleh karenanya, beberapa agenda strategis yang saya gaungkan waktu yang lalu, bersama Mendagri, adalah menekan MoU tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman tetap melakukan tindak pidana korupsi, lalu berlanjut - saya bersama Mendagri dan KPK juga menyusun kebijakan dan formulasi untuk menguatkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna meminimalisir



terjadinya penyimpangan dalam praktik penyelenggaraan negara terus kita kejar untuk menutup celah ini.

Selain itu, ada berbagai agenda strategis lainnya, yang perlu didorong, seperti:

- 1) Rekrutmen CPNS 2018, penyelesaian RPP Manajemen PPPK, pengembangan *talent pool* ASN nasional;
- 2) Implementasi Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019 - 2020, dan pengawasan berbasis *merit sistem*;
- 3) *Marchinery of government*, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government - join programme dengan pemerintah korea*), dan pengintegrasian e-Planning, e-Budgeting dan e-Reporting; serta
- 4) Penguatan pelayanan publik melalui mal pelayanan publik dan inovasi pelayanan publik.

Semuanya perlu dikawal secara sinergis oleh seluruh struktur dan rentang birokrasi dari pusat hingga ke daerah.



Bapak dan ibu hadirin yang saya hormati,

Dalam rekrutmen CPNS tahun 2018, saya menerima laporan sementara berupa data dari Panselnas, bahwa hingga tanggal 12 november lalu, hanya 128.236 yang memenuhi *passing grade* atau kurang dari 10 persen dari 1.724.990 yang mengikuti SKD. Padahal, yang diperlukan untuk ke tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) jumlahnya minimal tiga kali formasi untuk memenuhi yang memenuhi syarat dalam seleksi CPNS 2018 tahap SKD. Kekhawatiran yang muncul adalah tidak terpenuhinya



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

formasi yang telah ditetapkan, di sisi lainnya instansi membutuhkan tambahan PNS untuk menjamin pelayanan publik.



Disini saya luruskan, pertama, bahwa saya bersyukur, sesungguhnya yang lulus itu, mencerminkan bahwa kita masih memiliki potensi anak bangsa yang mampu bersaing di tingkat global. Pola pikir kita harus diangkat, ke tataran internasional, bahwa dibutuhkan kualitas yang baik dari ASN untuk penyelenggaraan birokrasi yang lebih baik. Cerminannya, ya mereka yang lulus itu, walaupun jumlahnya demikian.

Kedua, adanya kebutuhan pelayanan publik yang harus tetap berjalan juga tidak bisa dinafikkan, pemerintah punya kewajiban untuk melayani publik. Publik juga semakin menggeliat untuk mau berperan dalam roda pemerintahan. Oleh karenanya, Panselnas sedang kontinu melakukan evaluasi dan dalam waktu dekat akan segera diumumkan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan negara.

Selanjutnya, saya titipkan pola pembinaan dan pengembangan manajemen ASN di daerah kepada bapak dan ibu semua, sebagai berikut:

1. Lakukanlah perencanaan ASN yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan potensi daerah, tentu dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan beban kerja;
2. Implementasikan pengadaan pegawai melalui rekrutmen dan seleksi yang transparan dan akuntabel. Kita sudah berlakukan *Computer Assisted Test (CAT)*; lalu ada *assessment* berbasis kompetensi untuk seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT); serta rekrutmen *talent scouting*, profesional, dan pola inklusif lainnya.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

3. Kembangkan kompetensi dan kapasitas yang berkeadilan melalui *training need analysis* untuk memperkecil *gap* kompetensi, serta mengembangkan ASN *Corporate University* yang diintegrasikan dengan manajemen talenta nasional.
4. Berikan penilaian kinerja dan remunerasi yang tepat, berdasarkan kompetensi dan kinerja.
5. Lakukan promosi, rotasi, dan pola pengembangan karir yang didesain berdasarkan sistem merit, memperhatikan kebutuhan nasional, serta *talent pool* untuk promosi, rencana pengembangan karir dan pengembangan kompetensi.
6. Kembangkan sistem pensiun dengan rasio penggantian yang layak, didanai secara penuh (*fully funded*), serta jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya yang jauh lebih baik.

Mengakhiri ini, saya tegaskan bahwa SDM aparatur memiliki peran yang sangat sentral dalam reformasi birokrasi. Oleh karenanya, perlu dilakukan investasi pengembangan SDM yang komprehensif sehingga ASN mampu menjadi penggerak reformasi birokrasi.

Investasi dalam pengembangan SDM ini adalah tugas besar yang harus bapak dan ibu jalankan di daerah, untuk menjamin pembangunan administrasi dan reformasi birokrasi yang mengarahkan bangsa dan negara mewujudkan cita - cita luhur kemakmuran rakyat.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



**PERESMIAN ISYEF *POINT* DAN APLIKASI ISYEF
JAKARTA, 20 NOVEMBER 2018**

Yang saya hormati:

- Dewan Pembina Indonesian Islamic Youth Economic Forum (ISYEF);
- Pengurus ISYEF; serta
- Hadirin yang Berbahagia.



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

- **Puji syukur** kita panjatkan ke hadirat *Allah SWT*, karena berkat hidayah-Nya, kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka peresmian ISYEF *point* dan aplikasi ISYEF.

Hadirin yang saya hormati,

- Sekarang, bangsa Indonesia tiba di suatu perlintasan yang mengharuskan dihadapinya **2 (dua) tantangan besar** untuk terwujudnya peradaban madani di masa depan. **Pertama**, adalah hadirnya **era baru revolusi industri 4.0.** - dimana seluruh negara sedang beradu cepat untuk beradaptasi dan mengubah



pola - pola transformasi kehidupan ke arah digitalisasi dan virtualisasi. **Kedua**, adalah **mewujudkan visi Indonesia 2045** (perjuangan untuk perubahan terbesar sepanjang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat, yang mencita - citakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia). Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara yang makmur, adil, berdaulat, dan maju, jika potensi **demografis** maupun **ekonomi** dapat dikelola dengan **sistem** maupun penyiapan **SDM Indonesia yang berkualitas**.

- ➔ Dalam ajang **IMF and World Bank Annual Meeting 2018** di Bali, semua pakar dan praktisi kebijakan ekonomi mengarahkan titik berat fokus pembangunan ekonomi dunia. Titik kunci pembangunan ekonomi negara di masa depan adalah **penguatan SDM** negara itu sendiri, artinya **generasi mudalah** yang menjadi tumpuan dan harapan berjayanya negeri tercinta ini.
- Dalam dimensi yang berbeda, sebagai wakil ketua umum DMI, saya juga melihat **peradaban Islam tumbuh semakin berkembang di seantero dunia**. Di Timur Tengah, Eropa, Asia Tenggara, khususnya Indonesia juga menunjukkan indikasi - indikasi yang mengarah pada fakta itu. Indonesia tumbuh sebagai pilar kekuatan Islam dunia dengan **jumlah penduduk muslim terbesar di dunia** dan **jumlah masjid yang mencapai hingga 1 juta** tersebar di seluruh tanah air. Peradaban Islam ini tumbuh seiring dengan **tumbuhnya komunitas generasi muda muslim yang semakin intensif datang ke masjid**, menjadikan masjid sebagai basis segala aktivitas baik agama, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lainnya,
 - ➔ Oleh karenanya, **dua dimensi yang berbeda ini** - 1) dimensi peradaban madani melalui perjuangan kita sebagai satu kesatuan negara dan bangsa; serta 2) dimensi tumbuhnya peradaban islam melalui kebangkitan generasi muda muslim di Indonesia, **tersimpul kuat pada satu ikatan yaitu “generasi muda”**.
 - ➔ Seperti **pemuda - pemudi ISYEF** yang hadir di hadapan saya, juga melambangkan generasi yang memacu perkembangan bangsa Indonesia, melalui peran dalam pemerintahan, maupun di sektor privat dan di tengah masyarakat.
- **Seluruh tantangan itu sesungguhnya menghadirkan peluang emas (gold - gospel - glory Indonesia)** yang akan benar - benar dapat didulang melalui suatu kesiapan yang baik, melalui perjuangan yang berat, bukan hanya sekedar belajar dan berencana, tetapi mulai bertindak dan merealisasikan seluruh ide, kreasi, dan inovasi besar yang terpendam dalam diri anda semua.

Hadirin yang saya banggakan,

- Saat kunjungan kerja di DIY, saya mengapresiasi hasil kerja keras **BukaLapak** yang bekerja sama dengan Pemprov DIY untuk mendorong kebangkitan ekonomi di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Lalu saat peringatan sumpah



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

pemuda di Djakarta Theatre, saya juga mengapresiasi **Go-jek** yang berhasil mendongkrak perekonomian Indonesia sebanyak 8,2 triliun rupiah per tahun melalui penghasilan mitra pengemudi, dan 1,7 triliun rupiah per tahun melalui penghasilan mitra UMKM. Go-jek sekarang termasuk dalam **50 perusahaan masa depan yang mengubah dunia di tahun 2017**, menduduki **peringkat 17 sejajar** dengan Apple, Unilever, serta Microsoft dan nilai perusahaannya pada bulan Februari 2018 tercatat mencapai **5 miliar USD**.

- ➔ Sebuah laporan bertajuk **"Southeast Asian Tech Report"** menyebutkan terdapat 8 (delapan) perusahaan rintisan / **start up** di Asia Tenggara yang menjadi **unicorn**: perusahaan baru yang memiliki valuasi di atas satu miliar USD. Dari delapan itu, 4 (empat) diantaranya dari Singapura dan 4 (empat) dari Indonesia. *Ini sangat luar biasa!!!*
- ➔ **Unicorn dari Indonesia itu adalah Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan BukaLapak.** Keempatnya digawangi oleh anak-anak muda yang mampu menghadapi perubahan global, seraya melahirkan inovasi - inovasi baru di bidangnya masing - masing.
- ➔ **Yang lebih luar biasa lagi**, 2 (dua) dari 4 (empat) perusahaan *start up* itu adalah dari kalangan pemuda muslim, yaitu: **Go-jek yang dirintis oleh Nadiem Makarim, dan BukaLapak yang dirintis oleh Ahmad Zaky.**
- ➔ Banyak rekam jejak keberhasilan mereka berdua dan juga keberhasilan para penggiat bisnis di bidang *e-Commerce* lainnya, yang patut diteladani dan dicontoh oleh generasi muda untuk tidak terkungkung kebiasaan dan rutinitas, tetapi mengembangkan kreativitas, inovasi, dan daya saing.
- ➔ Bayangkan pula, apabila **207 juta penduduk muslim Indonesia** yang didalamnya terisi oleh para pemuda, dapat menggerakkan **ekonomi syariah/keuangan islam**, maka ini adalah modal dasar dan kekuatan teramat besar yang harus dioptimalkan untuk menyelesaikan masalah ekonomi di segala bidang yang kemudian melahirkan solusi untuk mendorong kemajuan negara.

Hadirin yang saya hormati,

- Saya juga ingin menularkan pandangan tentang **KTT OKI**, yang dari tahun ke tahun juga memandang pertumbuhan ekonomi dunia untuk semakin inklusif, termasuk pada sektor keuangan karena penggunaan teknologi *digital* yang semakin masif.
 - ➔ Dalam ketidakpastian ekonomi global saat ini, **sektor keuangan Islam tumbuh menjadi paradigma baru** yang menawarkan peluang besar pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan, mengatasi berbagai isu pembangunan, serta menjadi mekanisme pendorong untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di tengah masyarakat.
 - ➔ **Basisnya apa? Ya masjid**, sebagaimana visi dan misi DMI *"Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid"*, maka sudah tepat pada



jalurnya, sekarang ISYEF mempelopori bagaimana tumbuhnya perekonomian yang berbasis kegiatan - kegiatan di masjid.

- **Contoh sederhana:** bayangkan sekitar satu juta masjid di Indonesia dapat menjadi **inkubator** bagi tumbuhnya peluang usaha yang memakmurkan masyarakat sekitar masjid, bukan hanya untuk yang bersifat komersial, tapi juga pada pengembangan keuangan Islam yang bersifat sosial. Walaupun dengan pembiayaan yang rendah, dari wakaf atau sukuk, namun dana tetap dapat dimobilisasi untuk mendapatkan *income* untuk menggiatkan aktivitas yang ekonomis, serta melibatkan peran serta masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya.



Hadirin yang saya hormati,

- Minggu depan, saya juga akan menghadiri **KTT G-20** di Argentina. Pertemuan ini akan dihadiri oleh **19 negara** yang memiliki perekonomian besar dunia **plus Uni Eropa**, Indonesia masuk sebagai salah satu anggotanya (posisi bangsa Indonesia sudah mendapatkan *prestige* khusus dari negara - negara maju). **G-20 menghimpun hampir 90% Produk Nasional Bruto (PNB, GNP) dunia + 80% total perdagangan dunia + 2/3 penduduk dunia**. Sebagai gambaran, fokus utama G-20 adalah **kerja sama untuk pengentasan kemiskinan dan tantangan ekonomi global**. Salah satu topik khususnya, juga perihal **cryptocurrency**, yang sekaligus ini menjadi pertanda bahwa kita semakin dekat dengan era mata uang bukan lagi sebagai alat pembayaran, tetapi mata uang



sebagai komoditas yang diperdagangkan - komoditas yang ditransformasikan melalui teknologi.

- ➔ Saya tidak ingin membahas lebih jauh, karena hal yang mendasar, yakni peredaran masif uang virtual dapat mengancam kredibilitas mata uang negara mana pun dan masih menimbulkan gejolak dunia. **Namun, yang saya garisbawahi**, sebentar lagi kita akan tiba di masa dimana - *apa yang ada di dunia nyata, hanyalah sisa dari apa yang sudah diselesaikan dari dunia maya*, dan saat kita mendorong pemanfaatan teknologi itu bisa jadi dapat **berdampak anomali** yang tidak sejalan dengan instrumen - instrumen pemerintahan dan negara.
- Besarnya kekuatan ekonomi Indonesia jangan lagi hanya bertumpu pada kekuatan konsumen (karena ini selaras dengan besarnya jumlah penduduk), tetapi mari mengubah dimulai dari diri sendiri, untuk produktif, dan mengubah peta kekuatan ekonomi Indonesia yang bertumpu pada daya produktivitas, membuka peluang, menyediakan lapangan kerja, kreatif dan inovatif menemukan hal - hal yang baru yang bernilai ekonomis.
 - ➔ **Mengapa demikian? Agar kita jangan kehilangan momentum.** **Momentum** dimana proyeksi PBB tentang **populasi absolut Indonesia di masa depan**, negeri ini akan berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 2025, lebih dari 285 juta jiwa pada tahun 2035 dan 290 juta jiwa pada tahun 2045. Baru setelah 2050 populasi Indonesia akan berkurang. Komposisi demografi Indonesia akan berkelimpahan dengan warga dengan usia produktif kerja. Jika produktif bekerja ➔ maka pendapatan meningkat ➔ konsumsi produk - produk meningkat ➔ investasi bertambah ➔ modal membesar ➔ produksi perokonomian semakin menguat ➔ kekuatan ekonomi nasional stabil.
 - ➔ **Kita jangan sampai kehilangan momentum ini. Sejak sekarang para generasi muda harus optimis ➔ cepatlah dalam berlomba, kuatlah dalam bersaing, berkreasilah dalam inovasi, jangan terbatas pada ruang yang sempit, tetapi berimajinasilah yang besar, tembuslah ruang dan dimensi global, hadirkan mimpi anda menjadi kenyataan dengan segenap perjuangan dan kerja keras, jangan hanya berdiam diri.**
- Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, saya mengapresiasi betul *launching ISYEF point* dan **aplikasi ISYEF** yang fokus pada pemberdayaan ekonomi pemuda, remaja dan marbot masjid, yang diluncurkan bersamaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, untuk meneladani ikhtiar Rasulullah SAW (sejarahnya dulu mengembangkan ekonomi umat melalui jalur perdagangan).
 - ➔ Dengan ini, besar harapan saya pemuda dan remaja masjid semakin terdorong niatnya dan upayanya untuk mengambil peluang yang ada di depan mata, untuk berpikir sama seperti para penggiat *start up* yang saya sebutkan di atas, tetap dengan konteks menjaga kaidah - kaidah lokal,



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

mengembangkan nasionalisme bangsa, dan berorientasi pada kemaslahatan ummat.

- ➔ Pijakan - pijakan ini akan menempatkan anak muda milenial yang berkumpul di masjid, bukan lagi hanya sekedar berkumpul, namun lebih modern, membuat aplikasi bisnis, mengembangkan hal - hal positif lainnya. Semoga aplikasi ini menjadi inspirasi bersama, dapat dikembangkan bersama, dan bermanfaat untuk masyarakat.
- ➔ Selamat dan sukses.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,



**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



**SAMBUTAN *LAUNCHING* PERESMIAN APLIKASI
ETLE, IVRIS, DAN LAYANAN SMS 8893
JAKARTA, 25 NOVEMBER 2018**

Yang saya hormati:

- Menteri Perhubungan RI;
- Ketua Komisi III dan V DPR RI;
- Ketua KPK RI;
- Ketua Ombudsman RI;
- Wakapolri dan Para Pejabat Utama Mabes Polri;
- Para Pejabat Utama pada TNI AD, AL dan AU;
- Ketua Kompolnas;
- Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten;
- Kapolda, Para Pejabat Utama dan Seluruh Jajaran Polda Metro Jaya;
- Para Direktur Bank Negeri, Bank Daerah, maupun Bank Swasta; serta
- Seluruh Tamu Undangan yang Saya Hormati.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Marilah memanjatkan **puji syukur** kehadirat *Allah SWT* atas segala karunia-Nya, kita dapat mengikuti acara *launching* salah satu inovasi dalam pelayanan publik - ***Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Integrated Vehicle Registration & Identification System (IVRIS) serta layanan sms info 8893.***

Saya selalu menggelorakan pentingnya *pengarus-utamaan program reformasi birokrasi* untuk mengubah tata kelola pemerintahan negara yang lebih adaptif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat, serta dinamika perubahan jaman yang kini mengarah pada era digitalisasi. Inti dari kerangka reformasi birokrasi, bukan hanya terletak pada optimalisasi konsep negara hadir untuk melayani publik dengan lebih cepat/lebih mudah/lebih efektif/lebih efisien, namun perubahan yang signifikan itu juga hendaknya menjadi landasan penting bagi transisi peradaban kehidupan yang lebih memakmurkan rakyat.

Oleh karenanya, penyelenggaraan *e-Government* dan *open government* perlu dikongkretisasi seluruh instansi pemerintahan, untuk melandasi kolaborasi penting antara pemerintah, masyarakat, dan sektor privat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan.

Saya, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengapresiasi penuh komitmen kuat dari seluruh instansi negara, khususnya Polri dan jajaran yang senantiasa berupaya merebut kepercayaan dan hati publik, melalui transformasi kinerja dan pelayanan yang lebih baik, dari masa ke masa. Perubahan



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

yang sangat cepat dan masif, bukan hanya ditunjukkan melalui data berupa angka dari berbagai survei independen dalam skala nasional maupun internasional (Polri menjadi lembaga peringkat ketiga paling dipercaya publik), namun fakta di lapangan memang berkata demikian. Banyak program dan aplikasi baru yang memadukan teknologi, kebijakan publik, dan unsur adat lokal untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Hingga akhirnya, unit kerja pada Polri juga mendapatkan Penghargaan Top 90 dan Top 44 Pelayanan Publik, Polri juga hadir sebagai *leading sector* atau *role model* zona integritas melalui raihan predikat WBK dan WBBM terbanyak.



Pun demikian juga dengan 3 (tiga) inovasi yang lahir sekarang (ETLE, IVRIS, dan layanan sms info 8893), mencapai puncak keunggulannya dengan mengintegrasikan sistem registrasi dan identifikasi Ranmor, sistem penegakan hukum serta sistem informasi di bidang lalu lintas, bahkan terbaru di bidang teknologi, hasilnya lebih efektif, bermanfaat luas, dan pasti teruji keberlanjutannya.

Ini adalah momentum penyemangat, ini adalah triger membangun, ini adalah *pilot project*, dan ini adalah wujud perubahan budaya kerja, yang memangkas birokrasi berbelit, yang meningkatkan profesionalisme SDM untuk memberikan pelayanan makin berkualitas untuk rakyat.

Oleh karenanya, selain memberikan apresiasi, saya berharap program ini dipertahankan, dikembangkan dan diluaskan, sehingga melibatkan penuh peran aktif masyarakat, pemda, dan *stakeholder* terkait lainnya, untuk semakin berupaya kuat meningkatkan *grade* kualitas pelayanannya untuk publik dan negeri tercinta.



Dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirohim*, hari ini, Minggu, tanggal 25 November 2018, saya resmikan peluncuran program inovasi ETLE, IVRIS, dan layanan sms info 8893.

Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



**SAMBUTAN KONFERENSI DAN MUSYAWARAH NASIONAL AUDITOR INTERN
PEMERINTAH INDONESIA TAHUN 2018
JAKARTA, 27 NOVEMBER 2018**

Yang saya hormati:

- Menteri Dalam Negeri;
- Wakil Ketua KPK;
- Kepala BPKP dan Para Pejabat di Lingkungan BPKP;
- Para Inspektur Jenderal/Inspektur Kementerian, Inspektur Utama/Inspektur LPNK
- Para Perwakilan dari Inspektur Prov/Kab/Kota dari Seluruh Indonesia; serta
- Seluruh Hadirin yang Berbahagia.



Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Selamat Pagi, Salam Sejahtera untuk Kita Sekalian.

Marilah memanjatkan puji syukur kehadiran *Allah SWT* atas segala karunia-Nya, sekaligus terima kasih atas kesempatan yang baik ini, sehingga kita dapat bersilaturahmi sekaligus menyatukan derap langkah perbaikan tata kelola



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

pemerintahan, yang bertumpu kuat pada peran sentral aparat pengawasan internal pemerintah.

Mengawali sambutan saya, tercatat rekam jejak sejarah dibangunnya aparat pengawasan internal yang melandasi cita - cita untuk menggelorakan reformasi birokrasi di seluruh K/L/pemda/instansi secara masif, cepat, dan berdaya ungkit optimal bagi terbentuknya sistem pengawasan akuntabilitas kinerja yang mandiri dan lebih melekat ke satuan kerja, mengingat pertimbangan tentang rentang struktur birokrasi negara yang demikian besarnya, serta geografi Indonesia yang demikian luasnya.

Perbaiki kebijakan dan instrumen reformasi birokrasi untuk mencapai tujuan nasional itu, pada akhirnya perlu diselaraskan dengan penguatan nilai-nilai anti korupsi yang berbasis etika penyelenggaraan negara dalam kerangka sistem integritas, sehingga perubahan ini bukan lagi sekedar *project*, tetapi dapat mengubah sistem penyelenggaraan negara yang besar, budaya kerja yang rapuh, serta praktik - praktik penyimpangan yang jauh dari kata “kepuasan dan kepercayaan publik”, menuju sesuatu yang lebih sempurna (*excellence*).

Maka, sejak tahun 2010, secara strategis, Kemen PANRB mendorong pembangunan unit kerja layanan percontohan melalui program zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun yang sama (2010) telah disusun *road map* reformasi birokrasi, untuk menjalankan perubahan pada 8 (delapan area) yaitu: pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparat, peraturan, dan manajemen perubahan. Seluruhnya, mengarahkan transformasi yang linear pada seluruh aspek tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang semakin bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.





Walaupun masih terdapat beberapa catatan dalam capaian reformasi birokrasi, terutama pada indeks persepsi korupsi yang masih bertahan pada peringkat ke-37, namun catatan kecilnya, nilainya meningkat. Artinya, terjadi *progress* yang perlahan tapi pasti, dan kita optimis bahwa capaian ini terus dapat ditingkatkan, melalui penyatuan derap langkah bersama dari seluruh unsur pengawasan, baik dari internal maupun eksternal, semuanya berperan penting untuk mengawal transisi akuntabilitas kinerja dan anggaran yang lebih baik.

Inilah yang mendorong urgensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), bahwa dalam banyak teori dan konsep, perspektif perubahan itu harus diubah, bukan hanya digerakkan melalui tekanan dari luar (eksternal), tetapi jauh lebih tajam jika perubahan itu didorong dari dalam (internal) dengan melalui proses pencegahan, ibarat pepatah dokter yaitu “lebih baik mencegah dari pada mengobati”.

Atas dasar pemikiran itulah, melalui PP 60/2008, pengawasan internal menjalankan fungsi dan perannya yang utama, yaitu:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko; serta
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Melalui ini, seluruh target-target nasional dapat berjalan pada “relnya”; dapat diawasi capaiannya, bahkan didampingi, disertai, diberikan saran perbaikan apabila ada kesalahan/penyimpangan. Melalui peran ini pula, tingkat kapabilitas APIP, tingkat kematangan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan indeks reformasi birokrasi dapat dijaga stabilitasnya.

Pertama, dalam mengawal indeks reformasi birokrasi, APIP adalah *assessor* yang mandiri, sekaligus penanggungjawab area perubahan peningkatan pengawasan (meliputi penanganan gratifikasi, benturan kepentingan, *whistle blower system*, serta pembangunan zona integritas). Kedua, dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, APIP mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Ketiga, dalam peningkatan penerapan pengendalian internal, APIP membina dan mendorong penerapan SPIP pada setiap instansi pemerintah.

Saya sungguh memberikan apresiasi yang mendalam, atas kontribusi optimal dari para aparatur pengawasan sekalian, grafik kategori peringkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin baik kecenderungannya pada tahun 2017 yaitu: **A → 16, BB → 62, B → 198, CC → 196, C → 138, D → 3**. Artinya, banyak instansi pemerintah mengalami perbaikan, karena semakin efisien dan akuntabel dalam penggunaan anggaran, serta mampu menetapkan ukuran dan target kinerja secara jelas.

Dampak efisiensi sangat signifikan, hal ini terlihat dari upaya *re-focusing* program, perumusan sasaran kerja, *cross-cutting* program yang tidak bermanfaat, serta penguatan sinergi lintas kelembagaan menguat, sehingga terjadi penghematan anggaran pemerintah sebesar 41,15 triliun rupiah pada tahun 2017. Selain itu, telah dibangun 109 unit percontohan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 18 unit percontohan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sekarang sudah diusulkan 910 satuan kerja pelayanan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Artinya, ini adalah capaian yang cukup progresif, puncaknya nanti, tepat pada tanggal 10 Desember 2018 (hari anti korupsi sedunia) akan diberikan apresiasi/*award* bagi instansi dan unit kerja yang menjadi *role model* bagi perubahan integritas yang bukan hanya berjalan di lingkungan instansinya, tetapi menjadi contoh yang menginduksi perubahan pada instansi lainnya.

Para hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan ini, ada beberapa pesan yang perlu saya sampaikan. Ke depan, peran APIP menjadi semakin diandalkan untuk mengarahkan tujuan “bahtera” reformasi birokrasi di Indonesia, apalagi melihat dinamika global, kawasan dan nasional yang semakin kompleks. Oleh karena itu, saya berpesan:

- 1) Bangunlah kompetensi yang lebih tinggi dan kualitas kerja yang lebih baik;
- 2) Wujudkanlah integritas auditor internal yang benar-benar independen, yang berorientasi pada perubahan ke arah yang lebih baik;
- 3) Jalankanlah fungsi *assurance* dan *consulting* yang membangun;
- 4) Perubahan adalah ketidakpastian, maka terbukalah dengan proses adaptasi dan bersinergilah dengan aparat pengawasan lainnya untuk menguatkan pengawasan yang lebih efektif.

Dengan demikian, APIP bukan lagi hanya bergerak pada ranah pengawasan akuntabilitas keuangan dan profesionalitas kinerja para birokrat, namun lebih dari pada itu, benar-benar menjadi tumpuan bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang maju dan modern, serta mewujudkan landasan kebangsaan untuk memenangkan persaingan global.

Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Drs. Syafruddin, M.Si.



**SEMINAR BAKOHUMAS TEMATIK
CAPAIAN 4 TAHUN REFORMASI BIROKRASI
SELASA, 27 NOVEMBER 2016**



Yang saya hormati:

- Ibu Rosarita Niken Widiastuti, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo;
- Sekretaris dan Para Deputi Kementerian PANRB;
- Para Pimpinan Bidang Kehumasan pada Lingkungan Kementerian dan Lembaga;
- Para Peserta Temu Bakohumas, Komunitas Informasi; serta
- Hadirin yang Berbahagia.

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Salam Sejahtera untuk Kita Sekalian.

Marilah memanjatkan puji syukur kehadirat *Allah SWT*, karena atas karunia-Nya, kita dapat bersilaturahmi dalam acara reguler/tahunan yaitu Temu Bakohumas 2018, sebagai momentum penting bagi penyelarasan cara pandang dan tindak lanjut program



kehumasan yang mendorong terwujudnya landasan informasi dan komunikasi yang positif, konstruktif, efektif, progresif dan kondusif bagi iklim kehidupan berbangsa, bagi berjalannya pembangunan pemerintah, serta bagi pelibatan optimal masyarakat dalam mendukung tata kelola penyelenggaraan negara yang profesional, dipercaya publik, mensejahterakan rakyat.

Oleh karenanya, hingga berjalannya pemerintahan di tahun 2018 ini, saya selaku Menteri PANRB menyampaikan apresiasi penuh kepada seluruh anggota Bakohumas baik pusat maupun daerah, yang sudah bekerja keras, berupaya optimal dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, menampung aspirasi publik, serta mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah.

Pekerjaan pada bidang ini, tidak “semudah membalikkan telapak tangan”, apalagi mencermati tantangan dan dinamika kebangsaan yang semakin kompleks di masa depan, terutama untuk menghadapi era revolusi digital, untuk mewujudkan visi Indonesia 2045, serta untuk memastikan di era demokratisasi sekarang bahwa pemerintah dapat bertahan dan tetap konsisten dipercaya publik, karena fenomena hadirnya *civilian/citizen/social power* di era demokratisasi, telah menggeser paradigma, bahkan memegang kendali besar bagi berjalannya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Segala capaian kinerja pemerintah harus mendapat legitimasi publik berupa kepercayaan dari masyarakat sehingga rakyat semakin yakin bahwa negara hadir untuk mereka, bahkan ikut berpartisipasi penuh dalam pemerintahan.

Dengan demikian, leading sektornya sekarang adalah Humas, kesuksesan seluruh organisasi modern ditopang oleh unit kehumasan/PR/*marketing* yang handal, bahkan menjadi *back bones* untuk meraih pelanggan. Bahwa jantung dan hatinya para pelanggan ini (dalam konteks pemerintahan bernama masyarakat), harus ditambah dan dibuat jatuh hati pada kinerja pemerintah yang semakin melayani publik.

Disadari kemudian, segenap perpanjangan tangan pemerintahan, meliputi instansi pemerintahan itu sendiri serta semua struktur organisasinya, butuh proses adaptasi yang lebih tajam dan lebih kuat. Termasuk Bakohumas, yang bukan hanya sebagai corong informasi pemerintah, tetapi juga sebagai ujung tombak reformasi tata kelola informasi yang menyediakan landasan sistem bagi penguatan reformasi birokrasi, mensinergikan kinerja dan kerjasama yang baik antar instansi dari pusat hingga pelosok terkecil di daerah, dan menyatukan gugus kinerja pada satu *frame* yaitu menghadirkan negara untuk tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan akuntabel.

Hadirin yang berbahagia,

Reformasi birokrasi adalah senyawa penting yang menjaga keseimbangan berbagai unsur pemerintahan dalam wadah negara, agar mampu menghadapi turbulensi global. Sejarahnya, inilah yang menyelamatkan Indonesia dari dampak krisis global periode 2008 lalu, dan ini pula yang dibutuhkan agar pemerintah tidak lagi jatuh ke masa suram krisis ekonomi apabila suatu saat nanti badai turbulensi ketidakpastian global secara tiba-tiba tiba menerpa Indonesia.

Selama 4 tahun terakhir, reformasi birokrasi semakin meningkat, terlihat dari grafik indeks persepsi pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi yang *trennya meningkat*, artinya kinerja penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik makin baik. Secara global, capaian ini mendorong naiknya



indeks daya saing nasional, indeks kemudahan berusaha, serta indeks efektivitas pemerintahan. Selain itu, implementasi SAKIP mendorong efisiensi dan menghemat anggaran sebanyak 41,15 triliun rupiah pada 2017, pembangunan zona integritas berkembang pesat dengan terbentuknya 109 unit percontohan WBK dan 18 WBBM pada tahun 2017, sampai gejala mewabah virus budaya kompetitif yang tercatat dari diusulkannya 910 satuan kerja pelayanan untuk mendapatkan WBK dan WBBM hingga pertengahan 2018.

Sepanjang 2014 s.d. 2017, telah dilakukan reduksi 23 lembaga non struktural yang tugasnya tumpang tindih dengan K/L teknis, juga dilakukan penataan kelembagaan pada 24 K/L untuk mendorong kinerja organisasi pada bidang Polhukam, perekonomian, kemaritiman, serta pembangunan manusia dan kebudayaan. Implementasi *e-Government* dan *open government* juga semakin dikuatkan, bukan hanya melibatkan teknologi pada seluruh basis penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat dan sektor privat dalam penyusunan kebijakannya agar kebijakan pemerintah nantinya bukan lagi menjadi wacana perdebatan publik, namun langsung dapat dieksekusi dan dilaksanakan secara gotong royong dan bahu-membahu antara pemerintah, masyarakat dan seluruh *stakeholder* terkait.

Lalu, jalan penguatan pelayanan publik juga diterobos seperti “jalan tol” melalui pembangunan 10 mal pelayanan publik (menyusul pembentukan 15 MPP di berbagai daerah) agar bebas hambatan, agar bebas dari aturan yang berbelit, lebih ringkas, cepat dan berorientasi pada optimalisasi hasil tanpa meninggalkan aspek aturan. Ada pula kompetisi inovasi pelayanan publik melalui Top 40 dan Top 99. Hal yang sangat membanggakan adalah salah satu dari Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat berhasil meraih juara pertama kompetisi PBB tentang inovasi pelayanan publik tingkat internasional. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang terintegrasi dengan Lapor! juga dibangun dengan kolaborasi infrastruktur sistem dari KSP dan Ombudsman RI, sehingga pengaduan yang masuk dapat direspon cepat oleh instansi terkait.

Satu yang terpenting, pembangunan SDM tidak boleh ditinggalkan, karena seluruh dunia butuh SDM berkualitas untuk mengelola sistem pemerintahan suatu negara. Pada ratas dipimpin Presiden di Istana Bogor lalu, pokok konsep membangun SDM Indonesia penting untuk mendorong tumbuhnya perekonomian bangsa. Perbaikan kualitas ASN sudah jelas dilakukan dengan mencari bibit ASN melalui proses rekrutmen yang transparan dan berintegritas. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT). Dari formasi sebanyak 238.015 CPNS, bukan lagi diserap tenaga pada bidang administratif, tetapi 52% untuk tenaga pendidikan, 25% untuk tenaga kesehatan, dan 23% tenaga teknis/infrastruktur.

Sejalan dengan itu, Permenpanrb 61/2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan / Formasi PNS dalam Seleksi CPNS Tahun 2018 sudah dikeluarkan dengan mensyaratkan rangking, bukan ambang batas. Hal ini dikarenakan untuk tetap menjaga kualitas, tetap mencari yang terbaik guna memenuhi kebutuhan pos-pos ASN yang memberi pelayanan bagi masyarakat.



Hadirin yang berbahagia,

Hal-hal tersebut diatas, bahkan banyak capaian kerja lainnya di bidang pemerintahan dalam lingkup reformasi birokrasi, perlu dipublikasikan secara utuh dan lebih luas, agar publik mengetahui, mengerti, dan memahami bahwa sangat banyak produk pelayanan yang dikeluarkan negara, dan masyarakat dapat memanfaatkannya langsung dalam berbagai aktivitasnya. Inilah esensinya, inilah inti pemikirannya, bahwa manajemen kehumasan bukan hanya untuk membranding citra positif bagi pemerintah, tetapi benar-benar menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, serta apa yang sudah diperbuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan itu.

Oleh karenanya, saya berharap acara seminar ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, lakukanlah diskusi secara positif, berikan saran dan masukan yang membangun. Bangunlah jejaring *network*, formulasikanlah strategi bersama, langkah bersama, dan tindakan bersama untuk memproyeksikan pola-pola manajemen media dan kehumasan yang menjawab kebutuhan publik, yang meredam keresahan masyarakat, sehingga dapat dibawa kembali dan diterapkan di instansi masing-masing.

Negara tidak akan pernah berhenti berproses untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, pelayanan kepada publik tidak akan pernah berhenti pada satu titik, dan seluruh komunitas Bakohumas punya peran sentral dalam menguatkan optimisme publik sebagai modal dan kekuatan sosial yang mendorong perubahan tata kelola pemerintahan untuk membawa segenap rakyat Indonesia menuju pada pintu gerbang bernama kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat kehadiran negara sejak kemerdekaan 73 tahun yang silam.

Sekian dan Terima Kasih.

Wabillaahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



**SAMBUTAN ACARA EVALUASI DAN APRESIASI
UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2018
JAKARTA, 27 NOVEMBER 2018**



Yang saya hormati:

- Para Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
- Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PANRB;
- Para Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- Insan Pers dan Media; serta
- Hadirin Tamu Undangan yang Berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Salam Sejahtera untuk Kita Sekalian.

Marilah memanjatkan puji syukur kehadirat *Allah SWT*, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri acara *Evaluasi dan Apresiasi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2018*.

Dalam skala global, perkembangan peradaban manusia telah mendorong dinamisasi sistem pemerintahan negara, lebih mengerucut lagi memacu transformasi sistem administrasi publik di berbagai negara untuk semakin memenuhi kebutuhan



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

masyarakatnya. Salah satu fenomena dalam bidang pelayanan publik, paradigma dulu dimana pelayanan itu lebih kental berorientasi pada pengelola pelayanan (dikenal lebih birokratis, mengutamakan kepentingan organisasi pelayanan/pemerintah itu sendiri). Sekarang ini merupakan era yang menuntut perubahan paradigma menjadi lebih *supportif*, mengutamakan kepuasan pengguna layanan (*customer driven government*). Jika organisasi besar itu bernama negara, maka seluruh organ pemerintahan idealnya harus berjalan seiring dengan kehendak publik, fokusnya digeser menjadi “*putting the customer in the driver seat*” yaitu menempatkan pelanggan sebagai pengemudi, masyarakatlah yang menentukan apa yang perlu dilakukan dan kemana arah kinerja pemerintahan ini dituju. Inilah marwah “pemerintah yang melayani” di era demokratisasi saat ini, pelayanan publik menjadi ruh-nya.

Sejalan upaya itu, kita memasuki era keterbukaan, penyelenggaraan negara bukan lagi dari *government to government* saja, tetapi juga *government to citizen* dan *government to private sector*. Artinya, pemerintahan semakin diarahkan untuk terbuka (*open government*), yang titik artikulasinya terletak pada transparansi, partisipasi sosial, akuntabilitas, *open data*, kemudahan akses informasi publik, kolaborasi dan koreksi, inovasi teknologi, dan perubahan kebijakan yang pro rakyat.



Di Korea Selatan, saya mencontohkan salah satu inovasi dari Kabupaten teluk Bintuni yang meraih penghargaan *The Best Inovation* pada *International Award* dari PBB, yaitu pengendalian malaria dengan sistem edat. Ini diawali dari hal sederhana, tetapi menyentuh langsung ke jantung pelayanan publik yaitu “harapan/hope masyarakat” akan hadirnya negara untuk perbaikan sosial.

Pun demikian, hari minggu yang lalu, saya me-*launching* program inovasi pelayanan publik ETLE, IVRIS dan sms layanan info 8893 Polda Metro Jaya, yang



mengintegrasikan sistem penegakan hukum, sistem registrasi dan identifikasi Ranmor serta sistem informasi dalam satu wadah. Ini adalah jawaban atas “harapan masyarakat” bagi solusi kemacetan tingkat tinggi yang terjadi di Ibu Kota Jakarta.

Begitu juga IPS Forum 2018, yang memberikan harapan bagi terbentuknya kolaborasi dan kerjasama antara penyedia pelayanan, pengguna pelayanan, dan pemerintah; *sharing* implementasi pelayanan publik terbaik di tanah negeri; serta menjadikannya sebagai etalase publik yang menunjukkan bahwa pemerintah berupaya masif dalam mendorong kemakmuran rakyat melalui Indonesia yang melayani.

Oleh karenanya, esensi utama pelayanan publik adalah menjawab harapan dan keinginan masyarakat, perubahan *landscape* pelayanan publik sejatinya ditujukan untuk memberikan pelayan *prima/service excellent*, yang telah dikuatkan melalui bangunan regulasi yang kokoh dalam UU 25/2009, dimana kebijakan publik ternyata tidaklah berdiri sendiri, namun disangga oleh pilar yaitu kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan pelibatan masyarakat, sumber daya manusia aparatur yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, inovasi, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Standar pelayanan publik ini telah menggariskan acuan yang wajib disusun, ditetapkan, diimplementasikan, serta dievaluasi secara berkelanjutan.

Iniilah yang menjadi landasan mengapa pelayanan publik dari seluruh unit kerja pemerintah perlu dievaluasi, agar kualitas pelayanan terus meningkat. Tahun 2018, evaluasi dilaksanakan di 208 kabupaten dan kota, serta 34 provinsi. Tujuan evaluasi bukan untuk menentukan benar atau salah, bukan pula untuk menumbuhkan kompetisi yang menggradasi kualitas pelayanan publik, bukan sebagai “pacuan/perlombaan” yang mendiskriminasi kualitas. Tetapi, evaluasi dimaksudkan untuk memberikan asistensi bagi kekurangan sehingga bisa diperbaiki, serta mendorong terwujudnya *clean and good governance*, serta lebih mendorong bagaimana pelayanan itu bermanfaat langsung bagi rakyat.





MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Hasil evaluasi pada 681 unit pelayanan menunjukkan bahwa indeks rata-rata provinsi 3,00; indeks rata-rata kabupaten/kota 3,17; dengan indeks total rata-rata unit penyelenggara pelayanan publik sebesar 3,08. Atas upaya keras itu, saya merasa perlu diberlakukan mekanisme *reward*, berupa apresiasi kepada 11 kepala daerah kategori pembina pelayanan publik sangat baik, 16 unit penyelenggara pelayanan dengan kategori A, 86 unit penyelenggara pelayanan dengan kategori A-, untuk memacu percepatan dan perbaikan pelayanan publik di seluruh wilayah. Apa yang sudah baik silahkan dicontoh, bagi yang belum jangan pula berkecil hati, namun lebih kuat mengupayakan perubahan yang lebih baik. Bagi penerima penghargaan juga jangan berhenti (ini bukan puncak), namun terus kembangkan dan perluas pelayanan publik agar dapat bermanfaat langsung untuk seluruh masyarakat bukan komunitas tertentu saja.

Mengakhiri sambutan ini, satu catatan penting saya, era digitalisasi perlu diantisipasi dengan baik, janganlah pesimis dan pasif, namun bersikaplah optimis sebagai bangsa yang besar. Bahwa dinamika kebangsaan di Indonesia mampu menyerap revolusi teknologi secara elastis dan menyalurkannya dalam program yang terintegrasi melalui payung sistem pemerintahan berbasis elektronik atau *e-Government*, artinya kompetisi yang memicu terbentuknya program yang silo-silo diredam, berubah kepada perluasan *magnitude* gelombang inovasi dengan cara replikasi. Inilah pekerjaan yang harus dijawab dan dipikul bersama, untuk menjamin keberlanjutan inovasi pelayanan publik yang makin berkualitas di Indonesia.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



DESEMBER
2018



**SAMBUTAN PADA
PENUTUPAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT I ANGKATAN XL (EMPAT PULUH)
JAKARTA, 7 NOVEMBER 2018**



Yang saya hormati:

- Kepala Lembaga Administrasi Negara, beserta Jajaran;
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Lintas Kementerian / Lembaga / Daerah;
- Para Widyaiswara;
- Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XI; serta
- Hadirin yang Berbahagia.

Assalaamua'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, sehingga kita dapat bersilaturahmi pada **Penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XL** yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).



Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, ASN memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini kita berada di penghujung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga tahun 2015-2019, dimana kebijakan pembangunan dalam bidang SDM aparatur berbasis sistem merit, yakni manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. RPJMN ketiga ini merupakan jembatan menuju RPJMN keempat tahun 2020-2024, dimana pada periode tersebut kita akan mewujudkan birokrasi pemerintahan berkelas dunia.

Banyak hal yang harus kita hadapi dan kita antisipasi pada periode RPJMN ketiga ini untuk menjemput RPJMN keempat, antara lain kesiapan dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan tingginya ekspektasi masyarakat, serta kesiapan ASN dalam menghadapi perubahan yang super cepat di era industri 4.0.

Faktanya saat ini, kita masih dihadapkan pada berbagai persoalan klasik birokrasi, antara lain masih tingginya *mismatch* antara jabatan ASN yang ada dengan potensi kewilayahan yang tersedia, komposisi ASN yang masih didominasi oleh jabatan administrasi umum, profesionalitas ASN yang harus terus ditingkatkan, serta disiplin yang masih membutuhkan pembinaan intensif. Padahal pada tahun 2024 nanti kita ingin mewujudkan *platform smart* ASN, yakni sosok SDM aparatur yang berintegritas dan profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa nasionalisme, ramah dan melayani (*hospitality*), mempunyai jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*), serta berjejaring yang luas (*networking*).



Hadirin yang saya banggakan,

Untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan yang semakin kompleks, serta menjawab permasalahan dalam budaya birokrasi pemerintahan, perlu upaya yang keras, cerdas dan ikhlas. Salah satunya adalah mengubah pola pikir dan cara pandang kita terhadap keberadaan ASN yang sebelumnya dipahami hanya sekedar pegawai yang digerakkan oleh aturan (*rule based*), menjadi modal SDM investatif yang berorientasi kepada kinerja (*performance based*). Karena itulah, maka arah kebijakan pembangunan ASN ke depan dikembangkan berdasarkan prinsip dasar *human capital management*, mulai dari perencanaan ASN; rekrutmen dan seleksi; pengembangan kompetensi; penilaian kinerja dan remunerasi; promosi, rotasi dan karir; sampai dengan purnabakti.

Pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I adalah salah satu aktualisasi konkret dari pengembangan kompetensi melalui pola pelatihan non klasikal yang menempatkan para peserta sebagai pemimpin perubahan. Dalam praktiknya, setiap peserta diwajibkan membuat proyek perubahan yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tentu harapannya proyek perubahan yang dibuat peserta tersebut bukan hanya untuk memenuhi syarat administrasi pelatihan, tetapi sebuah proyek berkelanjutan yang pada akhirnya harus memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja individu peserta maupun kinerja organisasi. Bahkan alumni pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I ini, diharapkan mampu menjadi agen perubahan nasional sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang efektif dan efisien, serta yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.





Hadirin sekalian,

Dalam skala makro nasional, Kementerian PANRB sedang mendesain sebuah kebijakan terobosan untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi aparatur negara melalui pengembangan *ASN Corporate University* (Corpu). Sebuah model pengembangan kompetensi yang diadopsi dari sektor korporasi yang terbukti dapat memberikan perubahan yang signifikan, seperti PT. Telkom, Bank Mandiri, PT. Kereta Api Indonesia (KAI), dan lain sebagainya.

Melalui ASN Corpu, model pembelajaran pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan objektif organisasi dengan menggunakan metode 80:20:10, yaitu:

- 80% *on the job training* baik dalam bentuk penugasan khusus/proyek, magang, rotasi, dan *task force assignment*;
- 20% dalam bentuk pemberian umpan-balik, *coaching-mentoring* yang melibatkan interaksi atasan-bawahan;
- 10% penambahan dan pengayaan pengetahuan melalui pembelajaran didaktik dan *e-Learning*.

Hadirin sekalian,

Sekembalinya saudara ke instansi masing-masing, saya berharap agar ide-ide atau pemikiran yang didapatkan dari pelatihan kepemimpinan serta proyek perubahan yang saudara gulirkan dapat diimplementasikan dan dikembangkan untuk mendukung pergerakan reformasi di instansi saudara masing - masing.

Saya juga mengingatkan agar terus dibangun kebersamaan dan jaringan yang sudah terjalin untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompetensi di bidang manajemen pemerintahan dan pembangunan. Semangat untuk terus berinovasi juga harus terus digelorakan dan dibangun pada unit-unit kerja yang saudara pimpin.

Hadirin sekalian,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi para peserta. Selanjutnya, dengan mengucapkan “***Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin***”, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I angkatan empat puluh, dengan ini saya nyatakan selesai dan ditutup secara resmi. Semoga Allah SWT memberkati kita dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



**LAPORAN PADA ACARA
PENGANUGERAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
JAKARTA, 10 DESEMBER 2018**



Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi Kita Sekalian.

Yang saya hormati:

- Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- Ketua Mahkamah Agung RI;
- Para Menteri Kabinet Kerja;
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Jaksa Agung RI;
- Para Pimpinan KPK;
- Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- Para Gubernur; Bupati; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Madya dan Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; serta



- Hadirin Sekalian.

Marilah memanjatkan puji syukur kehadiran *Allah SWT* yang melimpahkan karunia-Nya kepada kita, untuk menghadiri Acara Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2018”.

Bapak Wakil Presiden RI yang saya hormati, kami laporkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian PANRB dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia sekaligus menjadi “barometer capaian reformasi birokrasi” yang konkret, sistematis, berkelanjutan, juga terukur sebagaimana arah *grand design* reformasi birokrasi nasional.

Dunia kini sudah semakin berubah, peradaban kian modern, zaman semakin mutakhir. Di tengah perubahan itu, mereka yang tak ingin keluar dari zona nyaman, tetap anteng dalam *kepompong* masa silam yang tentu akan tertinggal oleh zaman. Saya kutip kalimat bijak dari *filsuf Yunani, Heraclitus*:

“you cannot step twice to the river, for the fresh waters are ever flowing upon you”.

Anda tidak akan dapat terjun pada sungai yang sama untuk kedua kalinya karena air sungai itu telah mengalir. Jadi, segalanya berubah dan kita harus berada di dalamnya.

Termasuk, perubahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang harus semakin baik, semakin maju, dan semakin diperbaiki terus-menerus untuk melandasi terwujudnya cita-cita pembangunan bangsa. Reformasi birokrasi bukan sekadar retorika, jargon, atau slogan semata-mata. Reformasi birokrasi itu nyata dan terukur. Ia menjadi nafas dalam roda pemerintahan yang lebih profesional. Ia dibangun melalui kerja keras yang dijiwai karakter dan integritas yang kuat.

Karakter dan integritas inilah akar yang utama bagi terselenggaranya pelayanan birokrasi yang profesional, yang pada akhirnya hanya bermuara pada satu tujuan yaitu kesejahteraan rakyat.

Reformasi birokrasi yang kita idam-idamkan tentu butuh waktu yang panjang dan perlu upaya yang kuat. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, yang optimistis dan sangat kompetitif untuk menyongsong visi Indonesia 2045 serta era revolusi industri 4.0. Kuncinya hanya satu, yaitu dengan membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang makin berkualitas.

Kita semua tentu ingin bergerak dan berubah selekas mungkin. Untuk itulah ada teladan dan panutan yang bisa menjadi panduan yang cepat bagi perubahan. Maka, kita pun membentuk *pilot project* percontohan reformasi birokrasi berupa zona integritas yang menjadi *role model* bagi unit kerja di semua sudut dan jenis pelayanan pemerintah. Zona-zona percontohan itulah yang kini dikenal sebagai berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pembangunan zona integritas juga sejalan dengan arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden RI pada berbagai kesempatan.



Kami laporkan bahwa sepanjang tahun 2018 ini, terdapat 910 unit kerja instansi pemerintah yang diusulkan untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Jumlah ini naik 88,4% dari tahun 2017 (sebanyak 483 unit kerja). Hasil evaluasi 910 unit kerja pelayanan tersebut, sebanyak 200 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 5 unit kerja ditetapkan sebagai WBBM, yang berasal dari 195 kementerian dan lembaga, 1 provinsi, dan 10 kabupaten/kota. Dari hasil evaluasi kita tahu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan K/L/Pemda dan seluruh jajaran birokrasi untuk berubah kearah yang lebih baik, lebih bersih, lebih memberikan pelayanan yang berkualitas.

Perbaikan pada sistem dan tata kelola birokrasi ini mencakup pembangunan budaya kinerja, manajemen sumber daya manusia, proses bisnis dan cara kerja yang efektif dan efisien, pengawasan dan pengendalian internal, transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan.

Tidak hanya sekedar membangun sistem, unit kerja percontohan juga didukung peningkatan integritas individu dan organisasi, serta kualitas pelayanan publik yang *outstanding*. Hal ini ditandai dengan indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi pelayanan publik berstandar tinggi.

Oleh karenanya, sangat penting bagi kami untuk tidak hanya berorientasi pada hasil ini, tetapi efek jangka panjangnya, menjadi contoh dan panduan unit kerja lainnya untuk meneladani, membangun tata kelola yang sama secara masif di seluruh unit pelayanan pemerintah hingga ke pelosok tanah air.

Inilah substansi utama pemberian penghargaan ini. Bukan sebagai akhir dari prestasi semata-mata, tetapi awal baru untuk mempertahankan, meluaskan, mengadaptasikan hal-hal baru untuk semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

publik yang menjawab dinamika kebangsaan, yang tentu semakin lebih kompleks di masa depan.



Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati,

Fokus pembangunan zona integritas (WBK dan WBBM) juga diletakkan untuk menguatkan tatanan hukum, partisipasi masyarakat, dan tata pemerintahan yang baik. Hal-hal yang menopang tegaknya demokrasi Indonesia. Maka, sungguh tepat, pengembangan zona integritas tumbuh menjamur dengan cepat pada 99 unit kerja pada sistem penegakan hukum di Indonesia (59 Polri, 13 Kejaksaan Agung, 7 MA, 10 Kemenkumham) sebagai *role model* terbaik di tahun 2018. Apabila pilar-pilar hukum semakin kokoh dan profesional, maka pilar lainnya juga semakin kokoh menopang pembangunan kesejahteraan.

Disisi lainnya, zona integritas pada 62 unit kerja pada Kementerian Keuangan, 8 unit kerja pada Kementerian Perindustrian, dan 3 unit kerja pada BPK juga signifikan dalam menyediakan landasan bagi tumbuhnya iklim perekonomian yang kondusif untuk pembangunan.

Segenap predikat terbaik yang disampirkan kepada unit-unit kerja yang terpilih ini tentu bukan jaminan pasti. Apabila dalam perjalanan waktu terdapat fakta yang bertentangan dengan predikat tersebut, maka predikat dapat dicabut. Secara internal saya menugaskan jajaran pada kedeputan bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur pengawasan untuk terus memonitor dan mengevaluasi pelayanan pada unit kerja yang sudah berpredikat WBK atau WBBM ini.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Pada akhirnya, besar harapan Kementerian PANRB, untuk mensosialisasikan predikat zona integritas (WBK dan WBBM) di seluruh titik strategis pelayanan, bukan hanya untuk menjadi pajangan, tetapi benar-benar menggelorakan peran serta masyarakat untuk langsung melakukan kontrol. Keterlibatan masyarakat ini sangat mendukung dan membantu terwujudnya zona integritas yang berkelanjutan, sehingga program reformasi birokrasi berdaya ungkit maksimal bagi pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia.

Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, kami mohon perkenan Bapak Wakil Presiden RI untuk memberikan arahan sekaligus penghargaan kepada pimpinan instansi pemerintah yang telah berhasil membangun zona integritas secara masif dan sistematis.

Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**SAMBUTAN ACARA PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI,
DAN PEMBERIAN APRESIASI POLRES / TA / TABES TAHUN 2018
JAKARTA, 11 DESEMBER 2018**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Yang saya hormati:

- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Kabaintelkam, Kakorlantas, Asrena Kapolri;
- Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB;
- Para Narasumber *Workshop* Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Polri
- Para Kapolres / Ta / Tabes (Sejumlah 201 Orang), Insan Media dan Hadirin Sekalian.

Marilah memanjatkan puji syukur kehadiran *Allah SWT*, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri acara Penyerahan Hasil Evaluasi dan Pemberian Apresiasi atas Pelayanan Publik pada Unit Kerja di Lingkungan Polri yaitu Polrestabes, Polresta, dan Polres Tahun 2018.





Para hadirin yang saya hormati,

Kemarin, saya memberikan penghargaan kepada 59 Satker pada Polri, yang telah mendukung perubahan internal institusi melalui pembangunan unit percontohan berpredikat *zona integritas*, baik itu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas dan Melayani (WBBM). Sekarang, tidak kalah pentingnya, saya juga memberikan penghargaan bagi para Kasatker dan Kasatwil, yang menunjukkan kinerja optimal dalam pelayanan publik institusi Polri.

Mengapa ini sangat penting? Pertama, sebagai anak bangsa yang pernah mengabdikan melalui institusi Polri, saya tahu betul, bahwa organisasi ini adalah organ utama dalam pemerintahan yang menopang peradaban bangsa. Apabila Polri semakin dipercaya dan dicintai publik, menjelma sebagai institusi “yang diharapkan” masyarakat, maka niscaya, seluruh arah pembangunan dapat dikawal menuju gerbang kesejahteraan rakyat. Kedua, Polri adalah alat negara yang mengokohkan tegaknya pilar supremasi hukum di saat gelombang era demokratisasi melanda Indonesia. Bila pilar ini runtuh, maka anomali dan ketidakpastian akan membayangi dan merusak sendi-sendi bernegara, alih-alih membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik, justru bisa jadi tidak terkendali arah dan tujuannya, kemudian berujung pada sia-sia. Ketiga, Polri adalah subbagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri, sehingga perannya bukan hanya sebagai mekanisme kontrol masyarakat, namun lebih penting lagi yaitu agen dan *pioneer* perubahan masyarakat.

Itulah mengapa, muncul istilah: *polisi penjaga kehidupan, polisi pejuang kemanusiaan dan polisi pemelihara jalannya peradaban!!!* *Sesungguhnya bangsa ini membutuhkan polisi untuk menciptakan perubahan. Anda dan kita semua di ruangan ini, adalah kunci perubahan.*





Perubahan itu bukanlah hal yang semudah membalikkan telapak tangan, namun perubahan itu adalah proses penyesuaian/adaptasi yang butuh waktu dan upaya ekstra keras, karena itu adalah syarat mutlak bagi semua komponen bangsa agar dinamis menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Sedikit bercerita pengalaman saat menghadiri KTT G-20 di Argentina, dimana sejumlah pemimpin negara maju dan organisasi internasional berkumpul menyatukan komitmen multilateral untuk mengatasi ketidakpastian global serta memperbaiki pertumbuhan pembangunan yang menyeluruh di seluruh negara dunia. Berbagai isu strategis seperti perdagangan internasional, stabilitas sistem keuangan internasional, perubahan iklim, ketahanan pertanian dan energi, serta digitalisasi ekonomi menjadi topiknya. Inilah proyeksi tantangan masa depan, yang harus dicermati oleh kementerian, instansi, lembaga, dan seluruh Pemda, karena imbasnya pasti menyentuh hingga level mikro kehidupan berbangsa. Apalagi Indonesia sedang bersiap diri untuk menyongsong era revolusi industri 4.0. dan mewujudkan visi Indonesia 2045.

Bapak dan ibu, para hadirin sekalian,

Kunci perubahan adalah dinamisasi sistem pemerintahan negara melalui transformasi sistem administrasi publik, lebih mengerucut lagi program reformasi birokrasi, harus terus dipacu, karena sesungguhnya masyarakat bukan lagi bersikap *wait and see*, menunggu dan melihat apa yang dilakukan pemerintah. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan terbelenggu pada rutinitas, justru publik ingin terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan, agar manfaatnya dirasakan langsung, hasilnya juga dapat menyentuh hingga komunitas terkecil sekalipun.

Penyelenggaraan negara juga tidak hanya berada pada ruang hubungan *government to government* saja, tetapi juga *government to citizen* dan *government to private sector*. Artinya, pemerintahan makin diarahkan terbuka, *open government*, yang titik artikulasinya terletak pada transparansi, partisipasi sosial, akuntabilitas, *open data*, akses informasi publik, kolaborasi dan kokreasi, inovasi teknologi serta perubahan kebijakan yang pro rakyat.

Selain itu, dalam bidang pelayanan publik, paradigma dulu yang kental dengan birokratisasi (mengutamakan kepentingan organisasi pelayanan atau pemerintah itu sendiri), sekarang harus diubah menjadi lebih *supportif*, mengutamakan kepuasan pengguna layanan (*customer driven government*).

Sekarang, seluruh organ pemerintahan idealnya berjalan seiring dengan kehendak publik, *masyarakatlah yang menentukan apa harapan yang perlu diwujudkan pemerintah dan ke mana arah kinerja pemerintahan ini dituju, inilah marwah "pemerintah yang melayani" di era demokratisasi saat ini, pelayanan publik menjadi ruh-nya*.

Oleh karenanya, saya memberikan apresiasi kepada Polri dan segenap jajaran Kasatwil, yang telah berupaya sekuat tenaga, bahu-membahu, menciptakan perubahan kinerja, yang tentu berbasis pada pelayanan publik. Banyak inovasi yang terbarukan dengan mengadaptasikan area pelayanan dengan perkembangan teknologi. Ini adalah praktik terbaik untuk menyegerakan sistem yang lebih profesional, cepat dan tidak berbelit, bahkan ini pula yang menjadi kunci perpolisian yang modern di masa depan.



Banyak unit kerja pada Polri meraih *award* Top 99 dan Top 44 pada kompetisi inovasi pelayanan publik, unit pelayanan Polri juga tidak absen dalam pembentukan 10 mall pelayanan publik. Lalu, saya cermati gelora perubahan dan pembaruan ini tidak berhenti. Justru menimbulkan semangat yang positif untuk berlomba - lomba menghadirkan inovasi yang menjawab harapan masyarakat. Contohnya: 2 (dua) minggu lalu, saya resmikan ETLE, IVRIS dan sms layanan info 8893 Polda Metro Jaya, ada pula *evolution cashless payment* PNPB SIM, SKCK, dan *traffic maze game* di Polrestabes Surabaya, dan masih banyak lagi tersebar di berbagai unit kerja di daerah-daerah.

Dalam IPS Forum, unit kerja pada Polri juga aktif menyediakan harapan bagi terbentuknya kolaborasi dan kerjasama antara penyedia pelayanan, pengguna pelayanan dan pemerintah; *sharing* implementasi pelayanan publik terbaik di tanah negeri; serta menjadikannya sebagai etalase produk-produk pelayanan bagi publik.

Dalam implementasi gerakan Indonesia melayani yang di *launching* di Manado, terlihat juga peran Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang transformasional, bahkan menjembatani beraneka ragam adat lokal. Ditambah lagi, penghargaan zona integritas terhadap total 67 unit kerja yang berpredikat WBK dan 5 unit kerja yang berpredikat WBBM, semakin melandasi pelayanan publik yang bersih, prima/*excellence*. Saya yakin, ini ibarat virus (dari pembuluh internal), akan cepat menyebar kesetiap tubuh organisasi, menginduksi perbaikan kultur, kinerja, dan institusi Polri secara menyeluruh.

Bapak dan ibu hadirin yang saya hormati,

Perubahan *landscape* pelayanan publik yang prima/*service excellent*, telah dikuatkan melalui bangunan regulasi yang kokoh dalam UU 25/2009, dimana pelayanan publik tidak berdiri sendiri, namun ditopang oleh kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan pelibatan masyarakat, sumber daya manusia aparatur yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, inovasi, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Standar pelayanan publik ini telah menggariskan acuan yang wajib disusun, ditetapkan, diimplementasikan, serta dievaluasi secara berkelanjutan agar kualitasnya terjaga, tidak menurun dan terus meningkat.

Bukan untuk menentukan benar atau salah, bukan pula untuk menumbuhkan kompetisi yang menggradasi kualitas pelayanan publik, bukan sebagai “pacuan/perlombaan” yang mendiskriminasi kualitas. Tetapi, evaluasi dimaksudkan untuk memberikan asistensi bagi kekurangan sehingga bisa diperbaiki, serta mendorong terwujudnya *clean and good governance*, serta lebih mendorong bagaimana pelayanan itu bermanfaat langsung bagi rakyat.

Tahun 2018, evaluasi dilaksanakan pada 5 Polrestabes, 18 Polresta, dan 171 Polres. Hasilnya menunjukkan bahwa indeks rata - rata 3,31, yang merupakan akumulasi dari 2 unit kerja di lingkup layanan SIM dan SKCK. Lalu, ada 2 (dua) Polres dengan kategori prima dan 19 (sembilan belas) Polres kategori sangat baik. Atas upaya hasil yang baik itu, saya perlu memberikan *reward*, untuk memacu percepatan dan perbaikan di seluruh unit kerja pelayanan publik.

Apa yang sudah baik silahkan dicontoh, bagi yang belum jangan pula berkecil hati, namun lebih kuat mengupayakan perubahan yang lebih baik. Bagi penerima



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

penghargaan juga jangan berhenti (ini bukan puncak), namun terus kembangkan dan perluas pelayanan publik agar dapat bermanfaat langsung untuk seluruh masyarakat bukan komunitas tertentu saja.



Mengakhiri sambutan ini, satu catatan penting saya, era digitalisasi perlu diantisipasi dengan baik, janganlah pesimis dan pasif, namun bersikaplah optimis sebagai bangsa yang besar, tunjukkan bahwa Indonesia mampu menyerap revolusi teknologi secara elastis dan menyalurkannya dalam program yang terintegrasi melalui payung sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*), artinya kompetisi yang memicu terbentuknya program yang silo-silo diredam, dan mulai diubah untuk perluasan *magnitude* gelombang inovasi dengan cara replikasi.

Ini lah pekerjaan yang harus dijawab dan dipikul bersama, untuk menjamin keberlanjutan inovasi pelayanan publik yang makin berkualitas di Indonesia.

***Sekian dan Terima Kasih.
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.***

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



**POINTERS SAMBUTAN
MALAM APRESIASI ANUGERAH ASN 2018
JAKARTA, 11 DESEMBER 2018**

Yang saya hormati:

- Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI;
 - Kepala BKN;
 - Kepala LAN;
 - Ketua dan Komisioner KASN;
 - Gubernur DKI Jakarta;
 - Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
 - Para Pejabat Kementerian PANRB;
 - Para Sekretaris Daerah Provinsi;
 - Para Pimpinan 25 Nominator Anugerah ASN 2018;
 - Para Kepala Biro SDM Kementerian/ Lembaga;
 - Dewan Juri Anugerah ASN 2018;
 - Para Nominator Anugerah ASN 2018 beserta Keluarga; serta
 - Hadirin yang Berbahagia.
-
- Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah motor penggerak pembangunan bangsa. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, ASN harus mampu menjadi pionir dan panutan dalam mengurai dan menjawab tantangan serta mendayagunakan berbagai peluang di era industri 4.0.
 - Untuk itu, ASN harus berintegritas, profesional, memiliki nasionalisme, menguasai teknologi informasi, mampu berbahasa asing, berjiwa *hospitality* dan *entrepreneurship*, serta mempunyai daya jejaring yang tinggi.
 - Dalam rangka mendapatkan sosok ASN panutan tersebut atau smart ASN, yang telah menunjukkan kinerja dan prestasi kerja sangat baik, bahkan melampaui panggilan tugasnya, serta untuk memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan, kementerian panrb menyelenggarakan ajang anugerah ASN 2018, untuk 2 (dua) kategori yakni kategori pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPT) teladan dan kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) inspiratif.
 - Untuk kategori PPT pratama teladan, mekanisme pengusulannya dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat berwenang melalui aplikasi. Sedangkan untuk kategori PNS inspiratif, mekanisme pengusulannya dilakukan oleh warga masyarakat melalui *platform* media sosial. Kategori PNS inspiratif ini merupakan terobosan inovatif yang baru pertama digelar untuk mendapatkan sosok ASN inspiratif melalui pelibatan masyarakat secara digital.



- Saat ini di tengah-tengah kita telah hadir 10 nomine PPT pratama teladan dan 15 nomine PNS inspiratif yang sebentar lagi akan diumumkan siapa diantara mereka yang akan terpilih menjadi yang terbaik dari yang baik, atau *best of the best* berdasarkan penilaian objektif dewan juri. Saya berharap, para nomine maupun yang terpilih menjadi yang terbaik nanti, akan menjadi duta ASN, yakni *role model* ASN yang mampu mengukir prestasi dan memahat inspirasi, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat, hingga narasi baik ASN ke depan akan terus bertumbuh dan menjadi inspirasi bagi masyarakat luas di persada ibu pertiwi.
- Atas terselenggaranya ajang anugerah ASN 2018 ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, kepada TVRI sebagai saluran pemersatu bangsa, PT. Taspen, Bank Bri, Taspen Life, Bank Mantap, serta warga masyarakat di seluruh pelosok nusantara yang telah berpartisipasi aktif meng-*upload* dan memviralkan narasi baik dan kiprah nyata ASN. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada jajaran dewan juri, Bapak Azwar Abubakar, Bapak Tasdik Kinanto, Bapak Helmi Yahya, Bapak Maman Suherman, Bapak Nugroho, Bapak Sulasmo, Bapak Ahmad Nugraha dan Bapak Wahyu Aji. Semoga kegiatan ini dapat memberikan makna dan manfaat bagi kita semuanya, serta mampu memotivasi keluarga besar ASN agar tidak pernah lelah mencintai republik ini dengan terus menerus mengukir prestasi dan memahat inspirasi.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

KEYNOTE SPEECH

**PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
DI KEMENTERIAN / LEMBAGA
JAKARTA, 12 DESEMBER 2018**

Yang saya hormati:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan;
- Para Pejabat Eselon I Kementerian Perhubungan;
- Para Direktur Utama BUMN Bidang Transportasi; serta
- Para Hadirin Sekalian yang Berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua





MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Marilah memanjatkan puji syukur kehadiran *Allah SWT*, atas karunia-Nya, kita dapat menghadiri acara *Forum Group Discussion*, yang sangat penting bagi penyediaan landasan untuk penguatan tata kelola di seluruh lini pemerintahan, melalui upaya penguatan kelembagaan Litbang dalam pengembangan kebijakan di kementerian/lembaga.

Gelombang reformasi birokrasi di Indonesia adalah kebutuhan utama, syarat multak, bahkan menjadi esensi terpenting yang harus diselenggarakan negara agar mampu adaptif menyangga perubahan dan ketidakpastian global. Bahkan, negara manapun di seluruh penjuru dunia, baik negara maju maupun berkembang berlomba memperbaiki tata kelola pemerintahan. Apapun kebijakannya, apapun nama programnya, apapun bentuk pemerintahannya, walaupun dengan karakteristik geografis, demografis dan kultural yang berbeda, namun tetaplah reformasi birokrasi yang menjadi tulang punggung negara itu untuk memacu pertumbuhan dan kemakmuran rakyatnya.

Dalam catatan sejarah dan berbagai penelitian ilmu pengetahuan bidang tata kelola pemerintah, di daratan Amerika, Timur Tengah maupun Benua Asia, sangat jelas tercatat, bahwa transformasi penting itu terletak pada perubahan sistem, yaitu:

- 1) Struktur organisasi yang adaptif dan responsif menghadapi dinamika global,
- 2) Tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berbasis teknologi, serta
- 3) Tumbuhnya budaya dan manajemen SDM yang kreatif, beretos kerja tinggi, produktif, dan berwawasan global.

Amerika Serikat dan China begitu kuatnya, bukan karena Washington ataupun Beijing, namun karena membangun provinsi, kota, daerah dan otoritas publik khusus yang mendorong progresifnya pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, serta menjadikannya sebagai pusat aktivitas ekonomi global.

Maka ini pula, gambaran yang patut kita cermati, mengapa Indonesia sangat perlu mengarahkan reformasi birokrasi untuk memperkuat kementerian / lembaga / Pemda bukan hanya untuk sekedar mengubah pola-pola pelayanan kepada masyarakat, tetapi sesungguhnya untuk merangkul seluruh potensi masyarakat dan mengarahkan “dunia usaha” untuk terlibat aktif bersama negara dalam membangun suatu cita abadi bangsa yaitu Indonesia madani.

Bapak dan ibu hadirin yang saya hormati,

Fungsi pemerintahan, 1) sebagai perumus kebijakan perundang - undangan dan produk hukum lainnya; 2) sebagai jembatan penghubung antar kementerian, lembaga dan daerah, sekaligus pengawasan dan fungsi pemantauan; 3) sebagai penyelenggara layanan publik; serta 4) sebagai pendukung terwujudnya pembangunan nasional. Tentunya perlu didukung dengan mekanisme penyusunan kebijakan yang terarah dan komprehensif.

Alurnya: kebijakan yang terarah dan komprehensif akan memacu perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja akan meningkatkan kepercayaan publik, dengan kepercayaan publik inilah pemerintah semakin yakin dan berkembang kemudian



melahirkan inovasi kebijakan yang dapat mengakselerasi tercapainya seluruh sasaran dan target pembangunan.

Kesimpulannya, ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah, yaitu: bagaimana memproduksi kebijakan publik yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing bangsa, serta bagaimana agar kebijakan publik itu tidak gagal.

Untuk mendukung penyusunan kebijakan yang tepat, sangat perlu diterapkan konsep *evidence based policy*, yaitu: penggunaan hasil penelitian, pengembangan dan informasi sebagai acuan dan pertimbangan yang memandu pimpinan kementerian dan lembaga dalam mengambil keputusan pada seluruh tahapan proses kebijakan. Inilah mengapa, peran unit organisasi yang menangani fungsi penelitian dan pengembangan menjadi sangat strategis. Bahkan ini pula urgensinya, mengapa negara berupaya keras membentuk lembaga dan unit kerja litbang.

Saat menjabat sebagai Kalemdiklat Polri, saya menginisiasi perubahan paradigma pengambilan kebijakan yang harus menjadi berbasis bukti, statistik, evaluasi kebijakan sebelumnya, bahkan saya kembangkan lembaga pendidikan pada ptik untuk menjalankan fungsi Litbang.

Setelah menjadi Menteri PANRB, realitanya, ada catatan penting, bahwa masih sedikit sekali pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Padahal hampir di setiap kementerian dan lembaga dibentuk “unit kerja” yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Mari bandingkan, di seluruh negara maju yang pernah saya kunjungi, semua kebijakan sangat bergantung pada hasil *research and development*. Lembaga riset menjadi tulang punggung penyusunan grand desain kebijakan dan administrasi publik.

Hal ini tentu mengindikasikan belum adanya koordinasi yang baik yang menyambungkan hasil penelitian pengembangan, untuk menyempurnakan kebijakan publik. Akibatnya, berbagai hasil penelitian hanya menjadi dokumen biasa, hanya menjadi lembaran usang, tidak menjadi *evidence* yang mencatat setiap langkah penyempurnaan tata kelola negara dalam menghadapi dinamika perubahan.

Persoalan ini nampaknya menjadi semakin rumit, karena K/L cenderung kurang memanfaatkan hasil Litbang dari berbagai lembaga non kementerian yang dibentuk negara untuk melaksanakan fungsi kelitbangan.

Sekian banyaknya unit kerja dan kelembagaan yang menjalankan fungsi litbang, yang menjadi berlian -- seakan tenggelam, menjadi sesuatu yang terpinggirkan, tidak dilirik, dan tidak berkontribusi optimal.

Dampak lainnya, anggaran Litbang pada kementerian dan lembaga membengkak. Sebagai catatan tahun 2016, penggunaan anggaran untuk penelitian dan pengembangan pada kementerian mencapai proporsi 80%, jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran penelitian dan pengembangan pada LPNK (16%) dan pemerintah daerah (4%).

Selanjutnya, fungsi Litbang yang merepresentasikan: 1) bagaimana seharusnya keinginan dan harapan publik dijawab melalui kehadiran negara, 2) yang menggali saran dan pendapat publik untuk perubahan kinerja, 3) yang menjadi perpanjangan



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

tangan pemerintah dalam meluaskan produk layanan → menjadi sesuatu yang sulit untuk digapai masyarakat, akhirnya budaya birokrasi selalu berorientasi pada *government will*, dan tata kelola pemerintahan selalu berjalan hanya pada satu arah (dari pemerintah saja). Padahal, di era *open government* sekarang, seharusnya berjalan “dua arah”.



Hadirin yang saya hormati,

Atas kondisi tersebut, dibutuhkan kebijakan yang sifatnya mendorong *efisiensi* dan *efektifitas*, melalui transformasi dan penguatan fungsi penelitian dan pengembangan, bukan hanya pada level struktur organisasi, tetapi juga membangun ekosistem pada sektor pengetahuan, sehingga terwujud keselarasan antara penerapan litbang dengan unsur penyusun kebijakan pada kementerian dan lembaga.

Saya berharap, kita semua dapat menangkap, inilah esensi penataan reformasi kelembagaan litbang, termasuk pada kementerian perhubungan. Pada kesempatan yang baik ini, melalui *forum group discussion* ini, komitmen dan kepercayaan akan paradigma pengambilan keputusan seluruh pejabat dan pimpinan pada kementerian dan kelembagaan dapat diletakkan kembali pada pilar-pilar fungsi penelitian dan pengembangan.

Untuk itu pula, saya rekomendasikan 3 (tiga) hal penting, sebagai bahan untuk diformulasikan melalui forum ini.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

- 1) Peyusunan bisnis proses yang dapat menggambarkan peran LPNK Litbang dan perguruan tinggi dalam proses perumusan kebijakan, perlu ditetapkan dalam suatu produk hukum yang mampu mengikat seluruh *stakeholder* pembuat kebijakan.
- 2) Optimalisasi jabatan fungsional analis kebijakan. Hasil penelitian para ahli perlu diformulasikan sebagai alternatif kebijakan melalui serangkaian proses analisis. Kebutuhan ini akan terpenuhi melalui ketersediaan kompetensi para analis kebijakan. Sesuai karakteristik tugas dan fungsinya, kedudukan analis kebijakan dapat berada di bawah direktur dan / atau pusat.
- 3) Saya titipkan untuk membangun *networking* yang baik dari seluruh kementerian, lembaga dan fungsi litbang untuk memudahkan akses keterbukaan dan transfer data secara lintas kelembagaan, karena sesungguhnya *evidence* itu juga dibutuhkan secara silang instansi, misalnya: *Polri butuh hasil riset pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Pertanian untuk formulasi kebijakan penegakan hukum yang tepat bagi stabilitas harga pangan menjelang lebaran.*

Mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut serta mendukung kelancaran forum diskusi. Mari berkolaborasi kuat, mari bersinergi utuh, mari bekerja bersama, tinggalkan pola pikir yang *parsial*, serta mari menguatkan fungsi penelitian dan pengembangan untuk mendukung perubahan tata kelola pemerintahan yang semakin maju melalui terciptanya berbagai produk kebijakan yang mendukung pencapaian visi Indonesia 2045.

Semoga *Allah SWT* senantiasa melimpahkan petunjuk-Nya bagi setiap langkah pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara.

Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



**KEYNOTE SPEECH RAKERNAS OMBUDSMAN RI (ORI)
JAKARTA, 13 DESEMBER 2018**

Yang terhormat:

- Ketua Ombudsman RI, Bapak Amzulian Rifai;
- Wakil Ketua; dan Anggota Ombudsman RI, para Peserta Rakernas; serta
- Hadirin yang Berbahagia.

Assalamua'Alaikum, Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi Kita Semua.

Marilah memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya, sekaligus terimakasih atas undangan sebagai pembicara dalam Rakernas Ombudsman RI guna mendorong penguatan kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengawasan yang berwibawa, efektif, dan adil.



Bapak dan ibu yang saya hormati,

Saat menghadiri KTT G-20 di Argentina, saya mencermati bagaimana para pemimpin dunia, pemimpin negara - negara maju, berpikir tentang upaya memacu pertumbuhan ekonomi untuk menghadapi ketidakpastian dan dinamika megatrends



global. Semua negara di dunia, mau tidak mau, suka tidak suka, terlarut dalam percaturan dunia. Paradigmanya bukan lagi mengutamakan untuk menjadi kuat karena *power* militernya, atau karena luas geografi dan demografi penduduknya. Sekarang paradigmanya berubah, yaitu semakin berlomba mentransformasikan pemerintahan negara untuk menjadi lebih cepat, efektif, adaptif serta menjawab kebutuhan masyarakat dan sektor bisnis, sehingga pada akhirnya inilah yang mendorong kekuatan baru, kekuatan ekonomi sebagai landasan kemajuan bangsa. Lalu, sistem dan tata kelola pemerintahan itu pula yang menggerakkan seluruh aspek kebangsaan (geografi, demografi, politik, ekonomi, budaya) untuk diarahkan pada tercapainya sasaran tujuan nasional.

Siapa yang lamban, siapa yang tidak mau berubah, tentu akan tertinggal dan kalah, dan resiko terbesarnya adalah kegagalan sistem pemerintahan untuk mempertahankan negaranya, organisasi besar bernama negara itu menjadi gagal, bangkrut, seperti yang terjadi pada Yunani, Venezuela.

Sejarahpun mencatat, bahwa dahulu pada tahun 2008, Indonesia pernah mengalami krisis maha dahsyat -- krisis moneter, namun Indonesia mampu lepas dan keluar dari jurang kegagalan itu, melalui suatu proses reformasi dalam birokrasi pemerintahan, yang tentu hingga sekarang masih berkelanjutan, berjalan secara gradual dan simultan, bahkan semakin ditata secara progresif melalui suatu grand desain dan road map birokrasi untuk mewujudkan visi Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur di tahun 2045, serta melampaui tantangan revolusi industri 4.0.





MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Sekali lagi, gelombang reformasi birokrasi di Indonesia adalah kebutuhan utama, syarat multak, bahkan menjadi esensi terpenting yang harus diselenggarakan oleh negara manapun di seluruh penjuru dunia. Apapun kebijakannya, apapun nama programnya, apapun bentuk pemerintahannya, walaupun dengan segala perbedaan karakteristik geografis, demografis dan kultural → tetaplah reformasi birokrasi yang menjadi tulang punggung negara itu untuk memacu pertumbuhan dan kemakmuran rakyatnya.

Sejarah dan berbagai penelitian ilmu pengetahuan bidang administrasi pemerintahan publik juga mencatat – bahwa di daratan Amerika, Eropa, Timur Tengah maupun Benua Asia → terjadi transformasi penting yang terletak pada perubahan sistem, yaitu: 1) struktur organisasi yang adaptif dan responsif menghadapi dinamika global, 2) tata kelola pemerintahan yang inklusif dan pelayanan publik berbasis teknologi, serta 3) tumbuhnya budaya dan manajemen sdm yang kreatif, beretos kerja tinggi, produktif, kompetitif dan berdaya saing tinggi.

Amerika Serikat dan China begitu kuatnya, bukan karena Washington ataupun Beijing, namun karena membangun provinsi, kota, daerah dan otoritas publik khusus yang mendorong progresifnya pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, serta menjadikannya sebagai pusat aktivitas ekonomi global.

Maka, untuk membangun kemajuan perekonomian Indonesia, sangat diperlukan penguatan pilar - pilar kinerja pemerintah hingga ujung terdepan pelayanan kepada masyarakat, baik pada setiap kementerian, lembaga, Pemda maupun otoritas publik lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan reformasi birokrasi yang semakin berkelas dunia di tahun 2024, melalui pembangunan infrastruktur birokrasi yang solid dan kokoh, perampingan struktur birokrasi, berlakunya *e-Government*, pemerintahan dijalankan secara terbuka -- *open government*, berbasis *human capital management*, budaya ASN berorientasi *citizen demand*, berwawasan global dan *merit based system*.

Para hadirin yang berbahagia,

Lebih fokus lagi, inti dari birokrasi pemerintahan tentu adalah pelayanan publik. Hingga saat ini telah dilakukan berbagai penyempurnaan melalui kebijakan publik yang konsisten terhadap perubahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima berkelas dunia di era *dynamic governance*.

Inilah yang membuat birokrasi adaptif merespons fase kritis, sehingga *outcome* reformasi birokrasi bukan lagi hanya ditujukan untuk mengubah/mendapatkan birokrasi profesional, tetapi lebih penting lagi, pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan dengan kepercayaan publik itulah pemerintah semakin percaya diri, berkembang dan melahirkan inovasi kebijakan yang dapat mengakselerasi tercapainya seluruh sasaran dan target pembangunan.

Kunci penting bagi berjalannya pelayanan publik yang responsif itu, terletak pada pola pemahaman tentang bagaimana mengimplementasikan pemerintahan yang terbuka, yang dinamis, yang kolaboratif dan yang terjun langsung ke bawah, secara proaktif menangkap keinginan masyarakat dan sektor bisnis, lalu mendesain dan menjalankan kebijakan itu secara bersama pula dengan masyarakatnya.

Oleh karenanya, Kementerian PANRB sebagai nahkoda kebijakan pelayanan publik secara nasional, telah menggulirkan beberapa program yang mendorong optimalisasi pelayanan publik pemerintah.



Pertama, pengukuran kualitas kinerja pelayanan publik melalui Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yang dimulai sejak tahun 2016. Tujuan utamanya, membangun unit pelayanan publik percontohan agar dapat dan mudah ditiru oleh unit kerja lainnya. Indeksnya meningkat secara gradual hingga tahun 2018 tercatat nilai indeks IPP sebesar 3,08 pada 208 kabupaten/kota. Saya memberikan penganugerahan bagi satuan kerja yang nilai pelayanan publiknya mendapatkan A (kategori pelayanan prima) dan A- (kategori sangat baik) kepada ratusan sakter K/L/Pemda di Balai Kartini dan Satker Polri di Hotel Shangrila, untuk memacu dinamisasi ini.

Lalu, survei kepuasan masyarakat sejak tahun 2015 s.d. 2018 juga menunjukkan tren peningkatan yang positif, yaitu dari 75,83 menjadi 80,77. Hal ini adalah indikasi bahwa masyarakat mengapresiasi pelayanan publik pemerintah, bahkan fenomenanya sekarang masyarakat sangat ingin tahu dan ingin ikut terlibat dengan apa yang dilakukan pemerintah.

Kedua, pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP), sebagai evolusi konsep pelayanan terpadu yang memudahkan masyarakat memperoleh layanan publik dari pemerintah pusat, daerah dan swasta hanya pada satu lokasi. Sudah dibangun 9 (sembilan), akhir tahun ini di Kabupaten Banyumas. Kemudian pada tahun 2019, sudah mengantre 17 daerah lainnya akan mendirikan MPP.

Ketiga, pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), sebagai peta penyediaan informasi pelayanan publik nasional. Sejak tahun 2015, jumlah instansi yang terintegrasi dengan SIPP meningkat dari sebanyak 85 instansi menjadi 116 pada tahun 2017.

Keempat, pengembangan inovasi pelayanan publik. Melalui suatu Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Sejak 2014 s.d. 2018, jumlah inovasi selalu meningkat, dan pemenangnya diikuti pada kompetisi pelayanan publik tingkat dunia. Tahun 2018, inovasi dari Kabupaten Teluk Bintuni disertakan dalam kompetisi tingkat dunia (PBB), dan berhasil menjadi juara untuk kategori yang diikuti.

Kelima, menggelorakan gerakan Indonesia melayani untuk mengubah kultur masyarakat, SDM ASN, dan para pengusaha, untuk terciptanya kultur melayani di dalam pelayanan publik, melalui Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKNRM), terakhir dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara.

Keseluruhan hal ini sangat erat berkaitan dengan bagaimana menyediakan iklim perekonomian dan investasi yang kondusif di Indonesia, meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia (*yang pada tahun 2018 justru mengalami penurunan menjadi peringkat 73 dari peringkat 72 pada tahun 2017*). Ini adalah PR besar yang perlu diselesaikan oleh semua anak bangsa, bukan hanya dengan mempercepat pelayanan publiknya, tetapi juga menguatkan integritas yang baik dan bebas KKN, agar kinerja pemerintah semakin akuntabel untuk capaian pembangunan.

Inilah mengapa, bertepatan hari anti korupsi sedunia (tanggal 10 Desember), saya memberikan penganugerahan zona integritas berupa Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) kepada hampir 200 unit kerja pemerintah, dan sudah ada 900 unit kerja lainnya yang diikuti sertakan pada tahun 2019. Ini adalah mekanisme yang sangat baik untuk dapat diluaskan agar pemerintah semakin dipercaya, semakin memberikan pelayanan yang baik.



Para hadirin yang saya hormati,

Sejalan dengan hal tersebut diatas, bagaimanakah caranya untuk memastikan agar keseluruhan kebijakan dan program itu dijalankan dengan benar, tepat sasaran, dan akuntabel?. Jawabannya hanya satu, yaitu melalui fungsi pengawasan, yang semakin dikembangkan dan dikuatkan. Bukan hanya dengan melibatkan pengawasan internal, atau melalui pengawasan masyarakat langsung, namun terlihat celah pengawasan itu harus ditambah pula melalui kehadiran lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman RI.

Kombinasi 3 (tiga) model pengawasan inilah yang mengawal dan semakin menajamkan kebijakan dan program untuk tetap berjalan pada relnya, tepat sasaran, mencegah mal administrasi dan diskriminasi pada praktek pelayanan publik, serta memastikan seluruh masyarakat terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara untuk mendapat mutu pelayanan publik yang terbaik dari kehadiran negara.

Saya sangat mengapresiasi partisipasi Ombudsman RI dalam pengawasan pelayanan publik melalui aplikasi pengaduan berbasis online Lapor SP4N yang dikembangkan Kementerian PANRB. Sejak tahun 2016 s.d. 2018, jumlah kementerian/lembaga/pemda yang terhubung meningkat secara signifikan dari 41 menjadi 591 instansi. Hal ini sangat efektif, pengaduan terhadap pelayanan publik dapat direspon cepat. Ombudsman RI juga dapat menjaring pelapor yang diluar saluran internal instansi, sehingga tidak ada satupun masyarakat yang tidak terlayani oleh negara.

Oleh karenanya, penguatan peran Ombudsman RI yang independen sudah tepat untuk mewujudkan *clean and good governance*, melalui fungsinya sebagai penjamin kualitas pelayanan publik dari negara kepada masyarakat, dan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

Namun, perkenankan, pada kesempatan yang baik ini, saya menitipkan saran untuk penguatan fungsi pengawasan pada Ombudsman RI, sebagai berikut:

1. Optimalkan mekanisme pencegahan mal administrasi, jaga konsistensi serta independensi melalui standar pelayanan dan sop teknis yang mengutamakan asas koordinasi, kolaborasi dan sinergi lintas sektoral serta mengacu pada kebijakan nasional tentang pelayanan publik;
2. Optimalkan pemeriksaan substansi laporan, investigasi awal dan pencatatan pada dokumen, serta langkah yang diperlukan pada lingkup kewenangan Ombudsman RI guna mendukung pemantauan dan evaluasi kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Kembangkan pola yang sifatnya *out of the box*, melalui arbitrase untuk menjembatani keterhubungan antara penyedia layanan publik dan masyarakat, serta advokasi untuk mengasistansi harapan masyarakat akan dinamika peningkatan pelayanan publik; serta
4. Kembangkan mekanisme pelayanan pengaduan yang terpadu serta pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat menyentuh masyarakat hingga ke ujung wilayah terluar dan perbatasan serta mendukung sosialisasi peran Ombudsman RI di tengah masyarakat.



Mengakhiri ini, saya berterimakasih atas peran aktif Ombudsman RI selama mendukung Panselnas serta pengawasan terhadap penyelenggaraan rekrutmen CPNS 2018, yang mudah-mudahan akan segera rampung. Kedepan, Kementerian PANRB tentunya berharap dapat bekerjasama dalam rekrutmen PPPK, serta kerjasama pada bidang lainnya, semoga berkelanjutan dan progresif di masa mendatang.

Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



**PENGARAHAN KEPADA JAJARAN KEPALA DAERAH
SE-SULAWESI SELATAN
MAKASSAR, 20 DESEMBER 2018**

Yang saya hormati:

- Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah;
- Para Pejabat Forkopimda Sulawesi Selatan;
- Para Pejabat Struktural, Bupati dan Wali Kota Se-Provinsi Sulsel; serta
- Para Hadirin dan Tamu Undangan yang Berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Marilah memanjatkan puji syukur kehadiran *Allah SWT* atas segala karunia-Nya, sehingga kita dapat *sharing* pandangan tentang perbaikan tata kelola pemerintahan yang mendorong terwujudnya kemajuan bangsa Indonesia.



Para hadirin yang berbahagia,

Dinamika berbagai aspek kebangsaan di Indonesia, tidak bisa terlepas dari isu global yang menjadi perhatian dunia. Dalam forum *IMF* dan *World Bank Annual Meeting*, *KTT G-20*, serta berbagai forum tingkat dunia yang membahas *Sustainable*



Development Goal's (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan untuk *people, planet, peace, partnership* dan *prosperity*. Seluruh isu utama bermuara pada “*satu titik*” yaitu bagaimana perubahan administrasi negara yang bertumpu pada adaptasi tata kelola pemerintahan dapat diarahkan untuk menghadapi ketidakpastian dan dinamika megatrends global.

Gejala ketidakpastian dan dinamika megatrends global dipengaruhi oleh tarik-menarik *balance of power* negara adikuasa, politik global menyeret transisi hubungan antar negara, ekonomi global sangat bergantung pada bangkitnya proteksionisme dan perang dagang negara - negara maju, disrupsi inovasi teknologi telah mengguncang *landscape* perindustrian di seluruh penjuru dunia, bahkan muncul tekanan pasar yang besar bagi negara berkembang, misalnya peningkatan drastis harga minyak mentah dan kekacauan pasar mata uang. Dinamika keamanan global juga mengkontraksi dimensi keamanan pada tataran nasional melalui “pipa” globalisasi, seakan dunia menjadi *borderless*, sekat - sekat negara menjadi kabur dan bias.



Realita lainnya, lubang kehancuran dunia yang lebih besar, sudah menunggu di hadapan “*peradaban manusia*”. Ledakan populasi manusia yang *eksplosif* menumbuhkan ancaman baru, karena daya dukung bumi terhadap kehidupan dan pasokan makanan dunia menjadi tidak seimbang, ditambah lagi dampak pencemaran yang mendisrupsi ketersediaan makanan dan air bersih, serta terkurasnya sumber energi dari perut bumi yang terus - menerus dieksplorasi. Intensitas perubahan iklim yang tidak terkendali memunculkan bencana di berbagai negara, melumpuhkan infrastruktur, dan untuk upaya pemulihannya membutuhkan biaya yang sangat besar dan upaya - upaya yang luar biasa.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Keseluruhan gejala tersebut dapat memicu instabilitas serta perubahan yang signifikan pada tataran global dan regional, bahkan menghadirkan *spillover* atau tumpahan pada berbagai aspek nasional yang dimensinya berubah sangat cepat, kompleks, vital, substansial dan fenomenal.

Para hadirin yang berbahagia,

Kita semua harus siap menghadapi seluruh dinamika global tersebut. Di tengah situasi dimana bangsa kita juga berpacu dalam pencapaian target pembangunan. Dalam perekonomian, kita melihat pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan, pola yang “*jawa sentris*” (terpusat di Jawa) diubah menjadi “*Indonesia sentris*” (merata di seluruh Indonesia), termasuk pemulihan infrastruktur pada daerah terdampak bencana alam dan pembangunan infrastruktur yang besar - besaran di Indonesia Timur. Selain itu, upaya penguatan fiskal dan moneter yang berfokus pada pertumbuhan investasi dan iklim ekonomi kondusif terus dikuatkan untuk mendorong lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta mengurangi ketimpangan antar daerah.

Pada sektor energi, kebijakan ekonomi negara juga difokuskan pada efisiensi energi, pembangunan hijau, sumber daya energi alternatif dan terbarukan, serta pengontrolan dampak dari limbah industri minyak dan gas. Langkah efisiensi dan efektifitas pelayanan publik juga semakin dioptimalkan untuk mendorong *ease of doing business* di Indonesia, sehingga dapat menyerap sumber pembiayaan dan investasi skala besar (terutama para investor dari luar yang ingin berinvestasi di Indonesia) serta merespons pertumbuhan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.

Ketersediaan ruang fiskal untuk pembangunan melalui pajak negara (sumber internal) dan investasi (sumber eksternal), juga dibangun melalui perbaikan kepercayaan dan minat investor untuk Indonesia serta peningkatan efektifitas pemerintahan yang berorientasi pada hasil atau *outcomes*-nya, bukan lagi berorientasi pada proses atau besaran target penyerapan anggaran.

Pada aspek sosial dan politik, Indonesia bertumbuh ke arah kematangan demokrasi. Walaupun, indeks demokrasi dunia tahun 2017 melalui rilis media ternama Amerika Serikat, *The Economist* menunjukkan Indonesia di peringkat 68 dan tergolong dalam kategori negara “*flawed democracies*”, dengan skor rata - rata 6,39 → tercatat ada sumbangan dari skor variabel “*keberfungsian pemerintahan*” sebesar 7,14 yang terus ditingkatkan melalui berbagai upaya mengefektifkan pemerintahan disaat berjalannya regenerasi politik. Ini menunjukkan aspek politik juga berpengaruh penting bagi perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui peran keterwakilan kepala daerah yang menduduki jabatan struktural dan menjalankan kepemimpinan pemerintahan di daerah.

Para hadirin yang berbahagia,

Dengan demikian, perubahan dunia, perubahan zaman, perubahan peradaban, menuntut arus perubahan besar dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk menjadi lebih profesional, cepat, efektif, adaptif serta menjawab kebutuhan masyarakat.



Saya kutip kalimat bijak, dari *Filsuf Yunani, Heraclitus (535 SM)*: “Anda tidak akan dapat terjun pada sungai yang sama untuk kedua kalinya karena air sungai itu telah mengalir. Jadi segalanya berubah, dan kita berada dalam perubahan, harus bergerak untuk berubah”.

Reformasi birokrasi menjadi inti dari perubahan, menjadi nafas dalam roda pemerintahan yang lebih profesional. Reformasi birokrasi butuh waktu yang panjang, perlu upaya yang kuat. Negara manapun di seluruh penjuru dunia (maju ataupun berkembang), berlomba memperbaiki tata kelola pemerintahan. Apapun kebijakannya, bentuk pemerintahannya, walaupun dengan karakteristik geografis, demografis dan kultural yang berbeda, tetaplah reformasi birokrasi yang menjadi tulang punggung negara itu untuk memacu pertumbuhan dan kemakmuran rakyatnya.

Siapa yang lamban, yang tidak mau berubah, akan tertinggal dan kalah. Resiko terbesarnya adalah kegagalan sistem pemerintahan untuk mempertahankan negaranya, organisasi besar bernama negara itu menjadi gagal, bangkrut, seperti yang terjadi pada Yunani, Venezuela.

Sejarahpun mencatat, dahulu tahun 2008, Indonesia pernah mengalami krisis maha dahsyat, krisis moneter, namun Indonesia mampu lepas dan keluar dari jurang itu, melalui suatu proses reformasi birokrasi pemerintahan, yang hingga sekarang masih berkelanjutan, berjalan secara gradual dan simultan, bahkan semakin ditata secara progresif melalui suatu grand desain dan *road map* birokrasi untuk mewujudkan visi Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur di tahun 2045, serta untuk melampaui tantangan revolusi industri 4.0. Inilah dua tantangan besar bangsa untuk menjadi *the big five state in the world*.

Sejarah dan berbagai penelitian ilmu pengetahuan bidang administrasi pemerintahan publik juga mencatat bahwa di daratan Amerika, Eropa, Timur Tengah maupun Benua Asia terjadi transformasi penting yang terletak pada perubahan sistem, yaitu:

- 1) struktur organisasi dan kelembagaan yang adaptif dan responsif menghadapi dinamika global;
- 2) tata kelola pemerintahan yang inklusif dan pelayanan publik berbasis teknologi, serta
- 3) tumbuhnya budaya dan manajemen SDM yang kreatif, beretos kerja tinggi, produktif, kompetitif dan berdaya saing tinggi.

Amerika begitu kuatnya bukan karena Washington, begitupun China yang *powerfull* bukan karena *Beijing*, Eropa begitu dahsyat bukan karena London, Paris, Berlin atau Amsterdam. Namun, karena mereka membangun provinsi, kota, daerah, dan otoritas publik khusus yang mendorong progresifnya pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, serta menjadikannya sebagai pusat aktivitas ekonomi global.

Maka, untuk membangun kemajuan perekonomian Indonesia, sangat diperlukan penguatan pilar - pilar kinerja pemerintah hingga ujung terdepan pelayanan negara kepada masyarakat, baik pada setiap kementerian, lembaga, pemda maupun otoritas publik lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan reformasi birokrasi yang semakin berkelas dunia di tahun 2024, melalui pembangunan infrastruktur birokrasi yang solid dan kokoh, perampingan struktur birokrasi, berlakunya *e-Government*, pemerintahan



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

dijalankan secara terbuka, *open government*, berbasis *human capital management*, budaya ASN berorientasi *citizen demand*, berwawasan global dan *merit based system*.

Sejalan dengan itu, tajuk *sustainable development goal's* dalam laporan pencapaian *SDGs* dikawasan regional Asia Pasifik dan Asean mencatat bahwa secara gradual, pemerintah Indonesia telah menjabarkan 17 tujuan pembangunan, salah satunya reformasi birokrasi, diletakkan pada tujuan ke-16, yaitu penguatan kelembagaan efektif, akuntabel dan inklusif melibatkan pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan dan media, serta akademisi dan pakar untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan yang menjawab harapan masyarakat.

Reformasi birokrasi di Indonesia yang telah bergulir sejak 20 tahun lalu, perlu didorong lebih progresif lagi, sehingga menjadi kekuatan utama untuk landasan kemajuan bangsa. Hal ini diyakini dapat menggerakkan seluruh aspek kebangsaan (geografi, demografi, politik, ekonomi, budaya) untuk tercapainya target pembangunan.

Oleh karenanya, sebelum grand desain reformasi 2010 - 2025 berakhir, sekarang disusun *blue print* administrasi publik yang berkelanjutan hingga 2045. Bappenas telah menggariskan haluan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan tahun 2026 – 2035. Struktur birokrasi yang berbasis *outcome*, *open government* untuk mengintegrasikan silo - silo pelayanan publik, pelayanan berorientasi kepuasan dan pelibatan masyarakat, dan ASN semakin kompetitif.

Untuk tahun 2036 – 2045, diharapkan pemerintah mengambil posisi penting sebagai regulator dan fasilitator pembangunan, struktur pemerintahan lebih fleksibel, adaptif dan lintas sektor, pemanfaatan internet untuk pemerintahan dan tata kelola pemerintah inklusif dan kolaboratif, serta pelayanan publik yang cepat dan mudah terjangkau.

Para hadirin yang berbahagia,

Seluruhnya itu adalah jalur untuk mencapai Indonesia yang maju dan berdaya saing tinggi. Kita harus tetap optimis dan jangan berpikir pesimis, jangan berkata tidak, tetapi ini peluang untuk menunjukkan bangsa ini mampu dan posisi / titik pijak reformasi birokrasi Indonesia sekarang sudah di rel tepat, kita makin mantap memasuki etape itu.

Sejak 2015 hingga akhir semester I 2018, indeks persepsi pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi telah diperbaiki dan menunjukkan tingkat perkembangan instansi pemerintahan dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang terus meningkat. Nilai rerata indeks reformasi birokrasi trennya meningkat. Pada K/L meningkat menjadi 71,91 (tahun 2017); pada pemerintah provinsi meningkat menjadi 60,47 (tahun 2017); dan pada kabupaten/kota meningkat menjadi 64,61 (tahun 2017).

Dampaknya, berbagai indeks kebangsaan Indonesia di mata dunia juga meningkat, 1) *world economic forum* mencatat indeks daya saing nasional naik 5 peringkat menjadi ranking 36 tahun 2017; 2) *world bank* mencatat indeks kemudahan berusaha naik 18 peringkat menjadi ranking 73 tahun 2018 dan indeks efektivitas pemerintah naik 17 peringkat tahun 2016; 3) *transparency international* mencatat indeks persepsi korupsi stabil pada skor 37.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), juga menggeser grafik kategori peringkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang pada



tahun 2015 kecenderungannya: A → 7, BB → 35, B → 75, CC → 201, C → 242, D → 15, pada tahun 2017 kecenderungan rapornya makin baik yaitu: A → 16, BB → 62, B → 198, CC → 196, C → 138, D → 3. Artinya, banyak instansi pemerintah mengalami perbaikan, karena semakin efisien melalui penghematan anggaran pemerintah sebanyak 41,15 triliun rupiah di tahun 2017.

Terkait SAKIP, peneliti dari *Univesity of Victoria*, Prof. Evan Berman, menyatakan hasil penelitiannya kepada 600 kepala daerah, bahwa ini adalah sistem manajemen kinerja baru di Asia yang memiliki keunggulan, patut dikembangkan dan menjadi *role model* baru untuk ditiru oleh negara lainnya khususnya kawasan Asia Pasifik.

SAKIP mendorong sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta memberikan asistensi penuh kepada K/L, pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat memfokuskan kinerja pemerintahan pada tercapainya sasaran pembangunan, yang terukur dan sistematis. Anggaran juga dapat digunakan secara akuntabel, hasilnya nampak dan terasa untuk masyarakat, lalu kegiatan yang sia - sia tidak lagi menjadi prioritas bahkan dihapuskan.

Namun saya mencatat, khusus untuk nilai SAKIP pada 24 pemerintahan se-Sulsel, terdapat 12 kategori CC (kurang), 9 kategori C (cukup) dan 3 kategori B (baik). Semoga tahun 2019, saya meminta kategori ini harus segera diubah, kinerja lebih ditingkatkan, performa lebih kuatkan.

Negara yang kuat hadir harus memberikan hasil kepada masyarakat melalui integritas. Maka tahun 2017, dibangun 109 unit percontohan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 18 unit percontohan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta diusulkan sebanyak 910 satuan kerja pelayanan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Di Asia, khususnya Indonesia, desentralisasi menjadi kunci dari perkembangan ekonomi negara. Budaya anti korupsi sangat penting untuk menguatkan kepercayaan publik, sehingga pemerintah lebih percaya diri dalam kemampuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kewenangan pada sistem desentralisasi, berjalannya reformasi birokrasi sangat bertumpu pada peran para kepala daerah. Sejarah kolonialisme, orde lama dan orde baru menapakkan jejaknya pada birokrasi sehingga tidak berperan optimal sebagai pilar pemerintahan karena ditarik lebih dalam sebagai corong dan pengejawantahan kehendak penguasa yang lahir melalui regenerasi politik. Idealnya, struktur birokrasi di pusat/daerah adalah abdi negara, bukan *legacy* sistem politik. Saya mengajak seluruh kepala daerah tetap fokus menguatkan fungsi negara melayani masyarakat, bekerja menjawab amanah rakyat sehingga program pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan dapat didukung penuh oleh masyarakat.

Bagi pemerintah daerah yang memperoleh predikat minimal BB untuk evaluasi akuntabilitas kinerjanya, akan diberikan Dana Insentif Daerah (DID). Tahun 2019, ada 45 kabupaten/kota yang menerima DID, untuk provinsi Sulsel terdapat 18 pemerintah daerah yang menerima DID. Dana ini bukan berarti dapat digunakan apa saja bagi kepala daerah, namun memiliki muatan dan tanggungjawab bagi kepala daerah untuk menggunakannya sebagai pendorong untuk lebih memacu peningkatan akuntabilitas kinerja.



Selain itu, Kementerian PANRB juga sedang menyusun mekanisme penyederhanaan, yakni:

- 1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
- 2) Laporan keterangan pertanggungjawaban serta
- 3) Laporan kinerja akan diintegrasikan menjadi satu menjadi laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, laporan keuangan tetap berdiri sendiri untuk mendukung laporan kinerja. → sistematis, tata cara dan metode sedang dibahas secara mendalam antara Kementerian PANRB dan Kemendagri, melalui revisi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja.

Selanjutnya, akan dibangun pula *sistem e-Performance* dan *e-Budgetting* pada pemerintah daerah, sudah ditandatangani MoU antara Kementerian PANRB dan BPKP tentang integrasi perencanaan, penganggaran dan kinerja Pemda. Aplikasi Simda pada BPKP dan sistem SAKIP pada Kementerian PANRB akan digabungkan dalam bentuk Simda SAKIP untuk mempercepat *e-Performance based buddetting*.

Para hadirin yang berbahagia,

Penguatan kelembagaan dan tata laksana juga diarahkan untuk memacu adaptasi, pola, performa dan pengembangan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE atau *e-Government*) dapat mengakselerasi pengembangan kebijakan dan akselerasi pelayanan publik yang mendukung pembangunan di era revolusi industri 4.0. *Big data, internet of things, cloud and supercomputing, geo-spatial data and broadband, artificial intelligence*, serta *deep machine learning* → hadir nyata dan tidak terelakkan.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Dapat dilihat *e-Commerce* (usaha *start up*) berkembang, yang menurut "*Southeast Asian Tech Report*", ada 4 (empat) perusahaan *start up* Indonesia menjadi *unicorn* (nilai valuasi diatas satu miliar USD). Banyak Pemda sudah memadukan tata kelola pemerintahan dengan teknologi (contoh: Yogyakarta), dan ini tentu langkah yang progresif dalam penguatan ekonomi. Makassar juga memasang ratusan CCTV pengawas untuk membangun sistem ketertiban dan keamanan kota. Luar biasa!

Catatan laporan *e-Government survey* oleh PBB di tahun 2018, peringkat *e-Government Development Indeks* (EDGI) Indonesia dikategorikan dalam kelompok *high edgi* dengan skor 0,5258 (diukur dari komponen pelayanan online, infrastruktur dan sumber daya manusia). Ini adalah jembatan yang tepat untuk mengantarkan Indonesia yang saat ini masih dikategorikan sebagai *lower middle income* (peringkat 107 dunia), untuk menuju bangsa yang maju di tahun 2045. Hal ini juga menjadi bukti, bahwa melalui transformasi digital, pemerintahan dapat meningkatkan kecepatan dan akses pelayanan untuk masyarakat. Jangan sampai kita kalah dengan Mongolia ataupun Myanmar.

Maka, tahun 2018, regulasi sudah diterbitkan (Perpres 95/2018 tentang SPBE), rancangan arsitektur SPBE nasional juga sedang dibangun untuk mengintegrasikan proses bisnis, infrastruktur, aplikasi dan keamanan. Percepatan pelaksanaan data diarahkan untuk integrasi layanan kearsipan, layanan kepegawaian dan layanan pengaduan publik. Evaluasi (terhadap 640 K/L/Pemda dan 35 institusi Polri), juga bertujuan membangun sistem evaluasi guna melihat kemajuan pelaksanaan SPBE di pusat maupun daerah.

Catatan terpenting untuk para kepala daerah, bahwa Kementerian PANRB memperpanjang kerja sama dengan pemerintah Korsel tentang pengembangan SPBE. Pemerintah menyiapkan aplikasi generik untuk 4 (empat) area percepatan: 1) perencanaan dan anggaran; 2) kepegawaian; 3) kearsipan dan 4) pengaduan publik, yang akan diterapkan ke semua K/L/daerah → bagi yang sudah memiliki aplikasi sejenis pada 4 (empat) area tersebut, dapat menggunakannya dengan memenuhi standar proses bisnis, namun data dan teknologi ditetapkan oleh Menteri PANRB, Menteri PPN / Bappenas, dan Menteri Kominfo. Saya minta dukungan penuh para kepala daerah mengimplementasikan program SPBE.

Paradigmanya sekarang diubah, bukan berlomba menghasilkan sesuatu yang baru, tetapi sifatnya *enterprise architecture* -- reformasi didukung secara digital, *big data* dibangun untuk menghilangkan *silo system*, dan dilakukan *collocation* pada fungsi yang tumpang tindih atau sama (tidak perlu mengubah struktur organisasi, tetapi memindahkan fungsi tersebut pada struktur tertentu yang sudah menjalankan fungsi yang sama).

Para hadirin yang berbahagia,

Pembangunan reformasi birokrasi juga tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka (*open government*). *Mindset* harus diubah, bahwa pemerintahan sekarang harus lebih terbuka, kolaboratif, dinamis dan terjun langsung ke bawah -- secara proaktif menangkap keinginan masyarakat dan sektor bisnis, lalu mendesain dan menjalankan kebijakan itu secara bersama pula dengan masyarakatnya.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Para kepala daerah harus dapat mempertahankan kualitas kinerja pelayanan publik melalui Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Tahun 2018 tercatat nilai indeks IPP sebesar 3,08 pada 208 kabupaten / kota. Survei kepuasan masyarakat sejak tahun 2015 s.d. 2018 menunjukkan tren peningkatan yang positif, yaitu dari 75,83 menjadi 80,77. Hal ini mengindikasikan apresiasi masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah.

Saya mengapresiasi hasil evaluasi pelayanan publik pada 11 Pemda di Sulsel, nilainya, cenderung B dan A. Nilai ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Saya juga ingin Pemda Sulsel berpartisipasi dalam Mal Pelayanan Publik (MPP), sebagai evolusi konsep pelayanan terpadu yang memudahkan masyarakat memperoleh layanan publik dari pemerintah pusat, daerah dan swasta hanya pada satu lokasi. → sudah dibangun 9 (sembilan), berikutnya tahun 2019 akan ada 17 daerah lainnya yang mendirikan MPP.

Inovasi pelayanan publik di daerah juga harus dikembangkan melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Sejak 2014 s.d. 2018, jumlah inovasi selalu meningkat, dan pemenangnya diikuti pada kompetisi pelayanan publik tingkat dunia. Sebagai contoh: tahun 2018, inovasi dari Kabupaten Teluk Bintuni disertakan dalam kompetisi tingkat dunia (PBB), dan berhasil menjadi juara untuk kategori yang diikuti.

Selain itu, perumusan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, perlu diterapkan melalui konsep *evidence based policy*, yang memanfaatkan hasil riset dari lembaga Litbang. Diseluruh negara maju, lembaga riset menjadi tulang punggung *grand desain* kebijakan publik, sedangkan di Indonesia masih sedikit sekali pemanfaatan hasil litbang untuk pengambilan kebijakan publik. Ini mengakibatkan budaya birokrasi selalu berorientasi pada *government will*, dan tata kelola pemerintahan selalu berjalan hanya satu arah, padahal di era *open government* → baik masyarakat, sektor privat dan pemerintah harus berkolaborasi utuh dalam mendesain kebijakan publik. Pemerintahan hadir bukan hanya untuk pemerintah, tetapi dari pemerintah untuk masyarakat dan dari pemerintah untuk sektor swasta.

Para hadirin yang berbahagia,

Poin keempat dan terakhir, saya menyoroti perihal pembangunan dan pengembangan SDM aparatur negara untuk diatensi penuh oleh seluruh kepala daerah.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah aset utama kemajuan bangsa, kita jangan berpikir lagi bahwa Indonesia luas geografinya besar, dengan sumber daya alam melimpah, *namun jika kualitas SDM yang kurang, siapa yang akan mengelola itu semua?*

Kondisi SDM terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang pada tahun 2016, menurut hasil asesmen / penelitian UNDP, menduduki peringkat 113 dari 188 negara dengan nilai indeks komposit 0,689 → Indonesia tergolong "*negara dengan pembangunan manusia sedang*".

Mengerucut lagi, pada postur ASN, terdapat 4,37 juta PNS, yang tersebar pada total 696 kementerian / lembaga dan pemda, dengan kondisi persebaran demografi PNS belum ideal karena didominasi kelompok fungsional umum (43%), modus usia 51 tahun (20,36%), serta jpt kategori kompetensi dan performa rendah (34,5%).

Oleh karenanya pada tahun 2018, persebaran ASN diubah, yaitu dari total formasi CPNS sejumlah 238.015 → 52% diantaranya direkrut untuk tenaga pendidikan,



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

25% tenaga kesehatan, dan 23% tenaga teknis/infrastruktur. Untuk tahun ini kita mencatat ada 3.627.811 pelamar. Pemerintah juga mengutamakan kualitas tanpa mengindahkan kebutuhan negara untuk menghadirkan pelayanan publik untuk masyarakat. Hingga berakhirnya periode tes SKB, tingkat kelulusan sudah mencapai 65,47% secara nasional.

Postur smart ASN harus dibangun secara mantap, karena merekalah yang menjadi pilar perubahan kinerja yang mendorong perubahan organisasi, institusi, dan bangsa. Merekalah yang 1) meningkatkan derajat reformasi birokrasi dan daya saing bangsa, 2) menguatkan integritas kepribadian bangsa, 3) mendorong efektifitas pemerintahan yang bebas korupsi dan independensi birokrasi dari intervensi politik, 4) menggaungkan nasionalisme dan menghilangkan mentalitas silo, 5) menjaga kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, 6) meningkatkan kredibilitas pemerintah, serta 7) menghadirkan negara untuk benar - benar dekat dan bermanfaat bagi rakyatnya.

Selanjutnya, pemerintah juga mempersiapkan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penetapan formasi akan dilakukan sejak Januari 2019, sehingga pada pertengahan tahun 2019 diharapkan sudah dimulai proses seleksinya.

Satu gagasan saya yang sedang diujai, yaitu revisi Permenpanrb tentang pola karier nasional. Guna menjaga keseimbangan kinerja pemerintahan pusat dan daerah, serta guna memberlakukan *learning knowledge*, melalui rotasi nasional bagi pejabat Eselon 1 dan 2 secara lintas kedaerahan. Dengan demikian, 12.600 JPT madya dan pratama dapat ditampung *talent pool nasional* yang menyediakan ketercukupan pilihan untuk lowongan jabatan serta menjaga kontribusi pejabat itu bagi pemerintah.

Pada akhirnya, saya berpesan, bahwa reformasi birokrasi bukan semata untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam melayani rakyat, namun yang terpenting meletakkan pondasi yang dibutuhkan bangsa untuk memenangkan persaingan global. Pucuk reformasi birokrasi ada di tangan para kepala daerah, peran anda sangatlah penting bagi perluasan akses pelayanan publik hingga ke pelosok daerah, penguatan ASN yang berintegritas, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, serta pengembangan tata laksana lembaga yang semakin menjawab harapan publik.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi para kepala daerah untuk semakin mengabdikan dan berjuang membangun bangsa Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan.

Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



SAMBUTAN
PERESMIAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA PADANG
PADANG, 27 DESEMBER 2018

Yang saya hormati:

- Gubernur, Kapolda, Unsur Forkopimda Prov. Sumatera Barat;
- Para Pejabat Struktural, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, Para Bupati Se-Provinsi Sumatera Barat; serta
- Para Hadirin yang Berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Marilah memanjatkan puji syukur kehadiran *Allah SWT*, atas karunia-Nya kita dapat menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Padang. Sekaligus, ini adalah "*kado tahun baru*", suatu instrumen publik yang dihadirkan negara khususnya Pemerintah Kota Padang bagi masyarakat, guna memudahkan dan memadukan pelayanan publik dari pusat, daerah bahkan menggandeng sektor swasta.

Peradaban manusia telah berubah, *landscape* kehidupan global, regional maupun nasional berubah, semua negara di dunia wajib melakukan transformasi terhadap tata kelola pemerintahan yang makin profesional, cepat, efektif, adaptif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Khususnya, Indonesia yang tumbuh dalam era demokratisasi, juga memasuki era digitalisasi dan virtualisasi, serta memiliki proyeksi menjadi *the big five state in the world*, sebagaimana visi Indonesia madani 2045. Oleh karena itu, reformasi birokrasi sebagai arus utama pendorong gelombang revolusi tata kelola pemerintahan bukan lagi hanya untuk mengontrol jalannya birokrasi dan menghadirkan pelayanan, namun juga mengubah paradigma para administrator publik untuk "*bukan lagi mendayung, tetapi mengemudi -- menetapkan arah dan tujuan serta memetakan jalan bagi perahu pemerintahan*". Makna dari hal ini adalah menempatkan masyarakat sebagai aspek terdepan dan prioritas, memposisikan pemerintah sebagai representasi publik, serta membangun institusi publik yang berintegritas, responsif melayani dan aktif memberdayakan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengaturan dan implementasi berbagai kebijakan publik di tingkat pusat maupun daerah.

Peneliti dari *Arizona State University* bernama *Robert B. Denhardt* dan *Janet V. Denhardt* mengungkapkan bahwa salah satu agenda reformasi yang dijalankan Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya adalah dengan menguatkan hubungan antara institusi publik dengan pelanggannya (masyarakatnya) sebagai "*mekanisme transaksi pasar yang melahirkan suatu komoditas kepentingan bersama*". Inilah yang mereka lakukan untuk mendorong privatisasi fungsi publik dan menjaga tercapainya tujuan kinerja pemerintah, membangkitkan efisiensi dan produktifitas, menghidupkan komitmen dan akuntabilitas mesin - mesin kelembagaan negara.

Dengan *benchmarking* itu, dapat dicermati bahwa konsep *the new public management* dalam administrasi negara sudah hadir. Ia telah mengelaborasi sentuhan



maupun pendekatan pelayanan negara yang lebih demokratis (lebih meningkatkan kepercayaan publik), menjembatani harapan dan keinginan warga, memberikan ruang bagi keterlibatan sosial dalam pemerintahan, menyegarkan kembali birokrasi publik, membangkitkan legitimasi bagi pemerintahan, serta melahirkan konsep *the new public service*.

Konsep ini, secara gradual semakin berkembang dan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan di Indonesia melalui penerapan *open government* -- pemerintahan yang terbuka. Besarnya keinginan publik untuk terlibat langsung dalam pemerintahan bahkan dalam perumusan kebijakan publik, harus disalurkan dan diartikulasikan pada satu titik pertemuan yaitu "*triangulasi kepentingan*" antara negara / pemerintah, sektor privat dan masyarakat. Bukan untuk semata menemukan solusi bagi salah satu pihak saja, tetapi membangun kolektifitas dan kebersamaan, tanggung jawab, serta proses kolaboratif yang mempertemukan antara harapan dan kebijakan publik.

Inilah *framework* yang mendorong lahirnya generasi pelayanan publik terpadu di Indonesia. Generasi pertamanya bernama Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), lalu generasi kedua bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), lalu mal pelayanan publik adalah generasi ketiga.

Para hadirin yang berbahagia,

Inspirasi mal pelayanan publik terinspirasi dari *Public Service Hall (PSH) Georgia* dan *Asan Xidmat Azerbaijan*, yang keduanya sudah menandatangani MoU kerja sama dengan Kementerian PANRB dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM aparatur.

Di dalam PSH Georgia terdapat 12 layanan kementerian/lembaga yang terintegrasi khususnya bagi kemudahan berusaha, mulai dari pendaftaran usaha, *inhouse notary* sampai perolehan hak atas tanah dan urusan pengesahan pernikahan. Semboyan mereka "*every services just 15 minutes*". Sebagai gambaran, orang membuat paspor seperti beli MC Donald -- cukup di mobil, foto dari mobil, mengisi formulir dan ambil paspor dari mobil. Termasuk, saat duduk ngopi di kafanya ada "menu" membuat paspor -- pelayan datang ke meja kopi sembari membawa kamera dan alat biometrik / sidik jari -- selesai ngopi, paspor langsung jadi.

Lalu, *axan xidmat* (diartikan pelayanan mudah) di Azerbaijan, adalah lembaga pelayanan publik yang memadukan pelayanan dari pemerintah dan swasta untuk kepentingan bisnis juga.

Disesuaikan dalam konteks Indonesia, Kementerian PANRB menghadirkan mal pelayanan publik Indonesia yang lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam satu tempat, serta menyatukan pelayanan publik lintas kewenangan yang pada umumnya sulit dilakukan karena struktur birokrasi Indonesia yang sangat besar, ada ruang pemisah antara kewenangan sentralisasi di pusat dan desentralisasi di daerah yang harus dihubungkan, ada kecabangan antara peran pemerintahan dan legislatif yang harus diseimbangkan, serta menguatnya harapan publik dalam demokrasi yang harus dijembatani pemerintah.

Hingga akhir tahun 2018, melalui kerangka regulasi Permenpanrb 23/2017, telah didirikan 9 (sembilan) MPP, yaitu: Batam, Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Denpasar, Badung, Karangasem, Tomohon, dan terakhir Padang. Walaupun sifatnya masih



modeling (artinya belum ada minimal *requirement*, pola pelayanan dan tipologi yang ajeg), namun MPP memberikan alternatif kemudahan pelayanan yang mengakomodasi kearifan lokal.

Kehadiran mal pelayanan publik, juga tidak menggradasi generasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), justru ini keistimewaannya → MPP dapat memayungi PTSP tanpa pula mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. PTSP di daerah sebenarnya sudah berjalan baik (melalui kerangka regulasi PP 18/2016 tentang perangkat daerah). Namun ada kendala yang perlu disempurnakan: 1) sebagian besar perijinan bergantung pada dinas teknisnya sehingga terjadi kelambatan proses; 2) beberapa Pemda belum mengikat perizinan dengan sertifikasi iso sehingga ada celah tidak terkontrol dan tidak transparan sehingga menjadi temuan lembaga pengawasan.

Oleh karenanya, Kementerian PANRB mendorong penuh upaya penyederhanaan perizinan melalui satu sistem aplikasi terintegrasi yang bernama -- *one single submission*, dan juga memang sejalan dengan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) sebagaimana Perpres 95/2018. Hingga sekarang, tahapannya masih pada identifikasi terhadap: 1) bentuk proses bisnis dan tata kelola data lintas instansi yang mengintegrasikan karakter format dan definisi data yang berbeda; 2) integrasi layanan dan interoperabilitas (keterhubungan) data yang membutuhkan rekayasa aplikasi ulang; serta 3) pembentukan arsitektur spbe untuk menyamakan cara pandang bagi integrasi pelayanan publik.

Para hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan evaluasi, pemerintah provinsi/kabupaten/kota juga semakin berlomba untuk membangun mal pelayanan publik, sehingga saya patut menyampaikan apresiasi yang setingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terbangunnya mal pelayanan publik, termasuk di kota Padang. Tentu, hal ini menjadi penyemangat bagi Kementerian PANRB, untuk berupaya menguatkan kerangka regulasi MPP menjadi Perpres, sehingga landasannya semakin kokoh dan dapat menjadi *grand strategy* peningkatan kualitas pelayanan publik nasional hingga ke seluruh penjuru wilayah Indonesia.

Besar harapan, bahwa *the new public service* melalui pembentukan mal pelayanan publik adalah jawaban bagi harapan publik tentang kemudahan perizinan, kecepatan pelayanan dan akhirnya mendorong kemudahan berusaha, meningkatkan pertumbuhan industri mikro maupun ekonomi makro. Melalui MPP, pola pikir yang ego sektoral antar instansi diubah menjadi kerja bersama yang berfokus pada komitmen melayani masyarakat. Bahkan, MPP mampu menjadi inkubator bagi tumbuhnya pelayanan pemerintah yang mengadopsi teknologi, serta menjadi wahana *leadership* yang melahirkan para ASN teladan berjiwa *hospitality*.

Pada akhirnya, saya mengajak seluruh *stakeholders* untuk ikut melanggengkan mal pelayanan publik. Jaga dan rawatlah gedung ini, didalamnya bangulah sistem kerja dan sinergi yang utuh, ubahlah budaya kerja yang melayani, tampilkanlah wajah birokrasi yang mengadopsi *the new public service*, sehingga benar - benar merepresentasikan kehadiran negara untuk memberikan manfaat luas bagi kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Semoga *Allah SWT*, senantiasa memberikan petunjuk-Nya, untuk jalan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.